



InfoKOM.X

Kata Mereka Magang Di Rumah Rakyat | Edisi 3

MAHASISWA MAGANG DI RUMAH RAKYAT



LAPORAN UTAMA
Literasi yang Terabaikan

LIPUTAN KHUSUS
Upaya Meningkatkan Mutu dan
Relevansi Perguruan Tinggi

BERITA UTAMA
Guru Bukan Beban
Tapi Investasi Bagi Generasi Bangsa

**PENANGGUNGJAWAB:**

H. Syaiful Huda
(Ketua Komisi X)

Agustina Wilujeng P., S.S., M.M.
(Wakil Ketua)

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP.
(Wakil Ketua)

Dr. Dede Yusuf ME., S.T., M.I.Pol.
(Wakil Ketua)

Dr. H. Abdul Fikri Faqih.
(Wakil Ketua)

KETUA PENGARAH:
Dadang Prayitna

WAKIL KETUA PENGARAH:
Zulfiqor, Iis Annisa

PIMPINAN REDAKSI:
Hasan Basri

WAKIL PIMPINAN REDAKSI:
Nurdin, Henny Listyowati,
M. Masad Masrur, Khaerul Anam,
Nuzul Husna, Anna Kurniawati,
Leornado L. Krisnada, Imam Yulianto,
Khalilah.

STAF REDAKSI:
Rhesa Ardiansyah, Desy Nirmala
Setyawati, Danang Nursaputro,
Hestningsih Nurcahyo Rini, Dwi
Lestari, M. Farhan Prabowo, A.
Baiquni Rismu Arda.

LAYOUT:
Hasan Basri, Muhamad
Nurhayadi.

PHOTOGRAFER:
Ruslan

Sirkulasi:
Syahroni

ALAMAT REDAKSI:
Nusantara I Komisi X

EMAIL: komisi10@dpr.go.id
komisi10dprri@gmail.com

TELP:
021-5756035/021-5756033

MEDIA SOSIAL:
Instagram: @komisix
Facebook: komisix



PENGANTAR REDAKSI

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, DPR-RI memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi ini, sudah cukup dipahami oleh publik. Namun, alam hal-hal tertentu, masyarakat sering mempertanyakan peran DPR dalam merespon suatu kebijakan pemerintah, bahkan tidak sedikit masyarakat menuntut DPR untuk lebih keras bersuara, khususnya terhadap hal-hal dipandang krusial. Tuntutan masyarakat terhadap DPR umumnya diungkapkan secara sederhana, seperti transparansi dan akuntabilitas, pengawasan kinerja dan evaluasi anggaran, lebih melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, responsif terhadap isu-isu penting masyarakat, tegasan dalam menanggapi korupsi, representasi yang adil, terbuka terhadap masukan dan kritik.

Sebagai respon terhadap keingintahuan masyarakat, Dalam beberapa tahun terakhir, DPR membuka diri bagi para mahasiswa untuk masuk dan terlibat “langsung” dalam berbagai kegiatan di DPR, yaitu Magang Merdeka Belajar bagi para mahasiswa yang masih aktif kuliah. Tak ketinggalan, Komisi X DPR RI yang membidangi antara lain tentang pendidikan, menyadari bahwa kegiatan ini menjadi “jembatan” antara keinginan masyarakat dengan kinerja DPR. Oleh karena itu, edisi InfokomX kali ini, para pembaca



dapat mengetahui langsung pengalaman para mahasiswa magang yang berada di Komisi X DPR RI.

Program Magang di DPR, diharapkan dapat memberikan penjelasan dan memengaruhi keingintahuan masyarakat terhadap kinerja DPR. Peserta magang yang mendapatkan pengalaman langsung di dalam DPR dapat memberikan wawasan internal tentang bagaimana proses pengambilan keputusan dan legislasi berlangsung. Magang dapat membantu mendekatkan DPR dengan masyarakat secara langsung. Melalui program magang, anggota DPR dapat menjelaskan proses pengambilan keputusan, pembuatan undang-undang, dan peran masing-masing anggota DPR. Informasi ini dapat membantu menghilangkan ketidakjelasan atau kesalahpahaman yang mungkin ada di kalangan masyarakat. Keberhasilan program magang ini, juga bergantung pada informasi yang disampaikan kepada peserta magang dan masyarakat, bahwa transparansi dan akurasi sangat penting untuk membangun kepercayaan.

Komisi X DPR, memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang menunjukkan komitmen yang luar biasa terhadap pembelajaran dan perkembangan pribadi selama periode magang. Prestasi para mahasiswa tidak hanya mencerminkan kemampuannya, tetapi juga menegaskan komitmen terhadap peningkatan diri dan pertumbuhan profesional. Komisi X DPR juga memberikan beberapa saran dan dorongan untuk masa depan: teruslah mengasah dan mengembangkan keterampilan

yang telah Anda peroleh selama magang. Dunia kerja selalu berkembang, dan keterampilan yang dikuasai dengan baik akan menjadi aset berharga. Tekankan pentingnya pendekatan proaktif terhadap perkembangan akademik, di mana kita tidak hanya puas dengan tingkat keterampilan saat ini tetapi selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan berkembang seiring waktu.

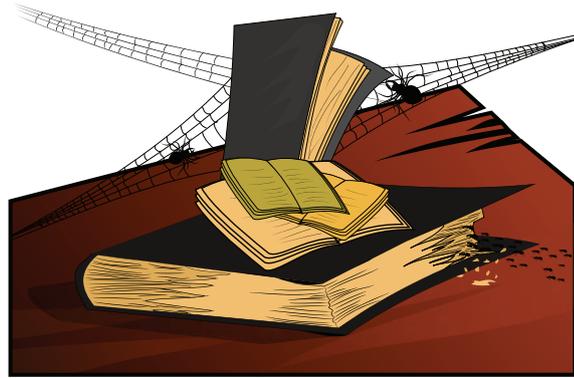
Komisi X DPR-RI kepada anak-anak mahasiswa yang selesai magang pada akhir 2023 ini, mengingatkan, setidaknya: pertama, jaga jaringan anda. Hubungan yang dibangun selama magang bisa menjadi kunci untuk peluang di masa depan. Pesan agar anda menjaga jaringan ini mencerminkan pentingnya aspek sosial dan interpersonal.

Kedua, tetap lapar akan pengetahuan. Kita berharap, keinginan akan pengetahuan, akan merangsang sikap mental yang aktif terhadap belajar dan pengembangan diri, menekankan bahwa belajar bukanlah tugas sekali-sekali, tetapi suatu perjalanan tanpa akhir menuju pemahaman yang lebih besar dan kedewasaan. Ketiga, percayalah pada diri sendiri. Hadapi tantangan dengan keberanian, dan teruslah berkembang sebagai individu dan profesional. Akhirnya, kita berharap masa depan membawa banyak kesuksesan dan pencapaian untuk para mahasiswa.

Selamat Membaca

DAFTAR

ISI



25 Laporan Utama
Literasi Yang Terabaikan



5
Kata Mereka
MAGANG DI RUMAH
RAKYAT



31 Liputan Khusus
Upaya Meningkatkan Mutu dan Relevansi Perguruan Tinggi



35 Berita Utama

Guru Bukan Beban Tapi Investasi Bagi Generasi Bangsa



59 Kunjungan Kerja Spesifik



43 Berita Anggota

Pengembangan Destinasi Wisata di Kota Pasuruan Penting Miliki Cagar Budaya yang Dilestarikan



63 Inspirasi

Sofyan Tan:
Dokter, Pendidik, sekaligus Politisi



55 Opini

Membangun Pariwisata Pasca Pandemi



65 Kementerian

(Kemendikbudristek & Kemenparekraf)



Kata Mereka MAGANG DI RUMAH RAKYAT



MOHAMMAD GERRARD R. A.
UNIVERSITAS SILIWANGI

“ Dengan adanya program ini, kita bisa merasakan secara langsung kinerja dari sebuah lembaga itu bukan hanya berdasarkan cerita- cerita di luar tetapi realita yang ada



VANISSA TASYA DEWI
UPI

“ Keberhasilan program magang ini tidak hanya menciptakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis,



ANANDA ASHANI FITRIANI DARWIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN

“ Selain mendapat pembelajaran, Peserta bisa menyaksikan setiap proses fungsi tersebut berjalan di DPR RI.



REVINA SIHOMBING
UNIVERSITAS UDAYANA, BALI



Saya sangat bersyukur bisa lolos magang di DPR RI dengan jumlah pendaftar 25rb lebih dan yang diterima hanya 250



MUH. FARHAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASAR



Semoga program ini terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih besar lagi bagi dunia pendidikan dan kemajuan bangsa.



ZULVA ROSARI USMAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



Program magang ini tentu saja telah membuat kesempatan seluas-luasnya bagi kami mahasiswa, untuk mengenal lebih dalam tentang DPR RI



KANEISHA LATHIFA ZAHRA
UNIVERSITAS INDONESIA



Magang di rumah rakyat meninggalkan kesan yang cukup unik pada cara berpikir dan sudut pandang saya dalam melihat kepentingan nasional yang beririsan dengan kedudukan Indonesia di mata global



ANDRE TUBECARDO DOLOKSARIBU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



Program magang ini memberikan pengalaman kepada mahasiswa sebelum masuk dalam dunia industri maupun birokrasi.



DESAK NYOMAN DEVI ADELIA Y.
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan program yang sangat bermanfaat utamanya bagi mahasiswa



KURNIA RACHMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



MBKM di DPR RI, banyak kegiatan yang bervariasi sehingga membuat mahasiswa tidak merasa bosan seperti kuliah umum, audiensi, dan sebagainya

Kata Mereka MAGANG DI RUMAH RAKYAT

Meningkatnya minat mahasiswa dalam mengikuti program 'Magang di Rumah Rakyat' menjadi indikator penting bagi DPR RI yang dinilai dapat menjadi suatu tempat pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa. Banyak sekali kegiatan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa tentang bagaimana suatu kebijakan diputuskan dari hulu ke hilir dan bagaimana proses tersebut dilaksanakan oleh pemerintah. Rapat paripurna merupakan salah satu kegiatan di DPR RI yang dapat menjadi sarana pembelajaran mengenai bagaimana keputusan-keputusan politik diambil. Mahasiswa dapat belajar mengenai tugas dan fungsi DPR RI dengan mengamatinya.

Program Kampus Merdeka dengan kegiatan Magang di Rumah Rakyat merupakan salah satu cara atau bentuk yang baik dalam memperkenalkan kepada para mahasiswa untuk dapat mengetahui tugas pokok dan fungsi DPR RI serta bagaimana proses kebijakan-kebijakan publik yang diambil di DPR RI. Program ini dapat menjadi kesempatan untuk

menunjukkan bahwa lembaga ini merupakan rumah rakyat yang inklusif, menjunjung tinggi keadilan, pemerataan, dan kesetaraan. Program ini memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk merasakan langsung kinerja sebuah lembaga, bukan berdasarkan cerita belaka.

Program MBKM di DPR RI sangat menarik karena mahasiswa tidak hanya diikutsertakan menjadi pengamat, tetapi juga terjun membantu setiap kegiatan yang ada di DPR RI. Selain itu, kita juga dapat merasakan bagaimana dunia kerja, berinteraksi dengan berbagai orang, membangun akses dan jaringan. Mahasiswa dapat melihat proses pembuatan perundang-undangan di komisi-komisi, membuat notulensi rapat, dan lain-lain. Ini sesuatu yang penting dan berharga, kita dapat membangun kemampuan-kemampuan soft skill, komunikasi, kolaborasi, inovasi, dan lain-lain. DPR RI adalah episentrum politik di Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, kita bisa langsung melihat bagaimana keputusan-keputusan politik

itu dibahas di DPR RI secara sungguh-sungguh dan publik perlu tahu.

Kegiatan MDRR DPR RI dapat menghasilkan output dan outcome yang sangat baik karena dapat menjadi inspirasi, dan menangkap peluang untuk mengembangkan karir di masyarakat, di bisnis, di pemerintahan, di politik, dan lain sebagainya. Dengan adanya program ini, kita menjadi tahu bagaimana dinamika politik, dan kita dapat menyaksikan itu secara langsung. Dari magang ini juga perspektif buruk kita terhadap DPR RI bisa berkurang dan justru bisa jauh lebih baik, karena mendapatkan banyak pelajaran yang tidak bisa ditemui di tempat lain. Dengan adanya program MBKM di DPR RI ini saya menyadari betapa pentingnya proses legislasi dalam menciptakan undang-



Mohammad Gerrard R. A. (Universitas Siliwangi)

undang dan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat. Setiap langkah dan tahapan memiliki peran krusial dalam menentukan arah kebijakan negara. Selain itu, saya jadi mengetahui betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Berbagai mekanisme partisipasi publik dan dialog antara anggota DPR RI dan konstituennya menunjukkan betapa pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat. Pengalaman dan ilmu betul-betul didapatkan ketika saya diberi kesempatan untuk berdiskusi dan berinteraksi secara langsung bersama para Tenaga Ahli, Anggota serta Pimpinan Komisi X DPR RI. Setelah berinteraksi, saya jadi mengetahui lebih

legislasi,
anggaran,

Dengan adanya program ini, kita bisa merasakan secara langsung kinerja dari sebuah lembaga itu bukan hanya berdasarkan cerita-cerita di luar tetapi realita yang ada

pengawasan dan wewenang sekalipun pekerjaan lainnya yang dilakukan oleh sebuah lembaga negara. Saya pun dapat mengetahui isu-isu terkini yang tengah berkembang di masyarakat terkait bidang tugas Komisi X DPR RI. Menurut saya, masyarakat perlu melihat lebih baik lagi mengenai DPR RI karena dalam praktiknya masih banyak anggota dewan yang memegang idealisme dan betul-betul memperjuangkan hak-hak rakyat. Tidak semua anggota dewan bersikap buruk atau negatif.

Kebijakan program MBKM di DPR RI ini membuka mata saya terhadap berbagai tantangan dan pertimbangan yang dihadapi anggota DPR RI saat membuat kebijakan, dari kebijakan perpajakan hingga isu-isu sosial, mereka harus mempertimbangkan berbagai perspektif dan implikasi yang mungkin terjadi. Saya mendapatkan kesan bahwa etika dan integritas memiliki peran yang sangat besar dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh anggota DPR RI. Ini menunjukkan bahwa tugas mereka tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi moral yang penting. Magang di DPR RI adalah kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ini sebagai motivasi

untuk turut serta dalam membangun negara dan masyarakat yang lebih baik. Kebijakan ini sudah pada track yang betul dan perlu didukung. Sistem pendidikan nasional perlu akselerasi agar dapat mengimbangi dinamika perubahan dan kemajuan dari berbagai negara-negara, sehingga kalau tidak sekarang dilakukan penyesuaian cepat dan fundamental maka ketertinggalan sistem pendidikan nasional kita akan semakin jauh. Generasi Emas 2045 akan menjadi pertaruhan.

Kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di DPR RI merupakan langkah maju yang signifikan dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi di Indonesia. Tak hanya itu, adanya program ini menjadi solusi inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan. Dengan adanya kebijakan ini saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan memberikan wawasan mendalam tentang proses legislatif dan tugas-tugas anggota parlemen. Pengalaman ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan-kebijakan dibuat dan diputuskan untuk kepentingan masyarakat.

Kata Mereka
MAGANG DI RUMAH
RAKYAT

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan program pembelajaran Pendidikan Tinggi yang dirancang untuk menciptakan komunitas pembelajaran yang mandiri dan serbaguna. Hal ini bertujuan untuk menciptakan generasi dan komunitas pembelajaran kreatif yang tidak membatasi dan memenuhi kebutuhan mahasiswa. Program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) yang ada di DPR RI yang mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang administrasi, persidangan dan keahlian.

Magang adalah proses untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama masa pendidikan untuk kemudian diaplikasikan dalam dunia pekerjaan, magang bertujuan untuk mempersiapkan para Mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja. Setjen DPR RI membuka kesempatan bagi Mahasiswa yang ingin melaksanakan kegiatan magang di Sekretariat Jenderal DPR RI pada periode tahun 2023. Pandangan saya

terhadap Kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di DPR RI sebagai salah satu mahasiswa yang berkesempatan secara langsung dapat Magang Di Rumah Rakyat menyatakan bahwa DPR RI telah berhasil dalam menjalankan kebijakan program tersebut.

Kebijakan yang baik berarti suatu panduan atau serangkaian tindakan yang dirancang secara cermat untuk mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan keadilan, efisiensi, dan dampaknya terhadap berbagai pemangku kepentingan. Kebijakan yang baik harus mencerminkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain

itu, kebijakan yang baik juga harus dapat diukur, dievaluasi, dan disesuaikan sesuai dengan perkembangan situasi atau perubahan kebutuhan. Integritas, partisipasi masyarakat, dan konsistensi dengan nilai-nilai dasar seperti keadilan sosial



Vanessa Tasya Dewi
 (Universitas Pendidikan
 Indonesia)

juga merupakan unsur

Keberhasilan program magang ini tidak hanya menciptakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis,

penting dalam menilai kebijakan yang baik.

Kebijakan yang baik dalam melaksanakan magang Merdeka di DPR RI melibatkan:

1. Transparansi: DPR RI menyediakan informasi diberbagai platform social media yang jelas mengenai persyaratan,

prosedur, dan tujuan dari Kampus Merdeka Magang Di Rumah Rakyat. Tujuan program ini adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk mengenal lebih dekat salah satu lembaga negara, yaitu DPR RI dan lembaga yang mendukung kinerja DPR RI

yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI.

2. Partisipasi Aktif: DPR RI memastikan partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan legislatif untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang proses politik dengan membuat absensi secara jelas dan terstruktur setiap harinya dengan bukti yang valid (foto dan tanda tangan)

3. Mentorship: DPR RI Menyediakan bimbingan dan mentorship yang efektif, sehingga mahasiswa terarah dalam menjalankan tugasnya.

4. Evaluasi Terstruktur: DPR RI menyusun sistem evaluasi yang terstruktur untuk mengukur pencapaian dan perkembangan mahasiswa selama magang.

5. Kesetaraan Kesempatan: DPR RI memastikan bahwa kesempatan magang terbuka untuk mahasiswa dari berbagai latar belakang dan perguruan tinggi. Peserta MDRR 2023 ini berasal dari berbagai kampus dari Sabang sampai Merauke, kurikulum pembagian dalam menentukan angkatan pun disesuaikan dengan Bhineka Tunggal Ika.

6. Keterlibatan Mitra: DPR RI melibatkan mahasiswa dalam kegiatan rapat dengan mitra-mitra terkait yang dapat meningkatkan kontribusi mereka pada masyarakat.

7. Kolaborasi dengan

Perguruan Tinggi: DPR RI selalu menghimbau perguruan tinggi dan Kemendikbudristek RI untuk menyelaraskan kurikulum akademis dengan pengalaman magang. Selain itu kesulitan dalam konservasi selalu menjadi topik yang diusahakan dapat diselesaikan dengan baik.

8. Komitmen pada Nilai-Nilai Demokrasi: DPR RI selalu memastikan bahwa kegiatan magang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan memperkuat pemahaman mahasiswa tentang prinsip-prinsip demokrasi.

Pemberian kebijakan magang yang sudah memuaskan dari DPR RI sebagai mitra Kampus Merdeka tentu merupakan langkah positif. Keberhasilan program magang ini tidak hanya menciptakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis, tetapi juga menunjukkan komitmen pihak legislatif dalam mendukung pendidikan tinggi yang mandiri dan serbaguna. Sangat penting untuk terus memonitor dan mengevaluasi kebijakan tersebut guna memastikan kelangsungan serta peningkatan kualitas pengalaman magang bagi mahasiswa.

Kata Mereka MAGANG DI RUMAH RAKYAT

Sejak kemunculan Kampus Merdeka pada 2020, program kebijakan ini kemudian menjadi tren, hingga rasanya belum afdol jika tidak berpartisipasi, setidaknya dalam satu program Kampus Merdeka. Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15 dan 18 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2021). Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) adalah salah satu program MBKM yang menyediakan sebuah sentralisasi kesempatan magang bagi mahasiswa dengan berbagai mitra kerja yang berkompeten, Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan salah satunya.

Sekretariat Jenderal DPR RI berpartisipasi dalam MSIB melalui program yang bertajuk Magang di Rumah

Rakyat (MDRR) DPR RI sejak 2021. Sebagai peserta MDRR DPR RI Angkatan III, saya melihat MDRR mengalami perkembangan yang dinamis, sejalan dengan program MSIB yang batch-nya bertransformasi dari segi kebijakan agar terus menyesuaikan dengan evaluasi dan rekomendasi berdasarkan batch sebelumnya. Salah satu perubahan yang paling terlihat sejak awal adalah perbedaan proses kualifikasi MDRR DPR RI angkatan I dan II dengan angkatan III, kemudian yang paling baru pada angkatan IV. Pendaftar MDRR DPR RI Angkatan I dan II harus melewati tahap tes dan wawancara, sedangkan pendaftar angkatan III akan langsung diberikan tawaran (offering) apabila lolos tahap screening Curriculum Vitae dan transkrip nilai. Sementara itu, tahap tes kembali dilaksanakan pada angkatan IV MDRR DPR RI yang saat ini dalam proses seleksi. Menurut saya, perbedaan tahapan seleksi sepanjang MDRR ini dapat dipadukan berdasarkan beberapa pertimbangan.

Angkatan III MDRR DPR RI terdiri dari 250 peserta magang dari seluruh Indonesia dengan komposisi yang begitu beragam. Terlihat jelas bagaimana inklusivitas

didukung pada pelaksanaan program MDRR DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi mitra kerja yang tidak hanya memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya bagi mahasiswa, tetapi juga kesempatan yang sama dan adil bagi seluruh kampus Indonesia. Tidak ada sentrisme yang terbangun pada seleksi MDRR DPR RI, menunjukkan dukungan pada konsep magang bagi mahasiswa adalah untuk sebaik-baiknya belajar tentang dunia kerja.

Selain mendapat pembelajaran, Peserta bisa menyaksikan setiap proses fungsi tersebut berjalan di DPR RI.

Pada sisi lain, perlu dipahami bahwa setiap lembaga

perusahaan/instansi memiliki kriteria sesuai dengan budaya kerja hingga value masing-masing. Maka dari itu, seleksi tes dan wawancara merupakan sebuah metode bagi lembaga untuk menyaring karyawan atau pun dalam hal ini, peserta magang. Namun, saya melihat bahwa seleksi magang tidak memerlukan tahapan tes sedemikian rupa karena kembali lagi pada esensi program MSIB, yang utamanya ingin memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk



Ananda Ashani Fitriani Darwis
(Universitas Hasanuddin)

mengembangkan kemampuan agar mampu menghadapi dinamika dunia kerja.

Menjaga output dari proses kualifikasi MSIB dapat dilakukan Sekretariat Jenderal DPR RI dengan memaksimalkan tahapan screening dan wawancara. Tahapan screening bertujuan untuk menyaring pendaftar MDRR DPR RI yang sesuai dengan kriteria lembaga Sekretariat Jenderal DPR RI, sedangkan tahapan wawancara menjadi kesempatan bagi pendaftar untuk melihat apakah capaian belajar yang diinginkan ada di agenda magang MDRR DPR RI. Proses seleksi seperti ini dapat berpotensi lebih efisien dan juga relevan, bagi peserta dan mitra kerja.

Program Magang di Rumah Rakyat DPR RI telah mencapai sasaran, dimana disebutkan program ini bertujuan memberikan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk mengenal lebih dekat DPR RI sebagai sebuah lembaga negara.

Melalui kegiatan magang, peserta tidak hanya diajak belajar bagaimana fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, tetapi juga menyaksikan setiap proses fungsi tersebut

berjalan di DPR RI. Proses tersebut dilaksanakan melalui kegiatan observasi, kuliah umum, audiensi, dan agenda lain di masing-masing penempatan unit kerja. Simulasi sidang pembentukan RUU pada akhir masa magang merupakan nilai plus dari pengalaman belajar lewat program MDRR DPR RI, dimana peserta magang dapat memaksimalkan pengalaman ilmu yang didapatkan melalui simulasi ini.

Program MDRR DPR RI juga terlaksana dengan menjaga koordinasi erat dengan tim MSIB Kampus Merdeka. Hal ini membuat peserta magang sangat terbantu dalam mengakses informasi kegiatan MSIB. Program MDRR DPR RI merupakan salah satu program mitra kerja MSIB yang baik dan memiliki ciri khas tersendiri. Evaluasi pengembangan program MDRR DPR RI harus terus menerus dilaksanakan dengan mempertimbangkan saran dan kritik dari setiap angkatan MDRR DPR RI serta mentor dan co-mentor. Kedepannya, MDRR DPR RI diharapkan mampu mengenalkan lembaga DPR RI dan mengembangkan skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

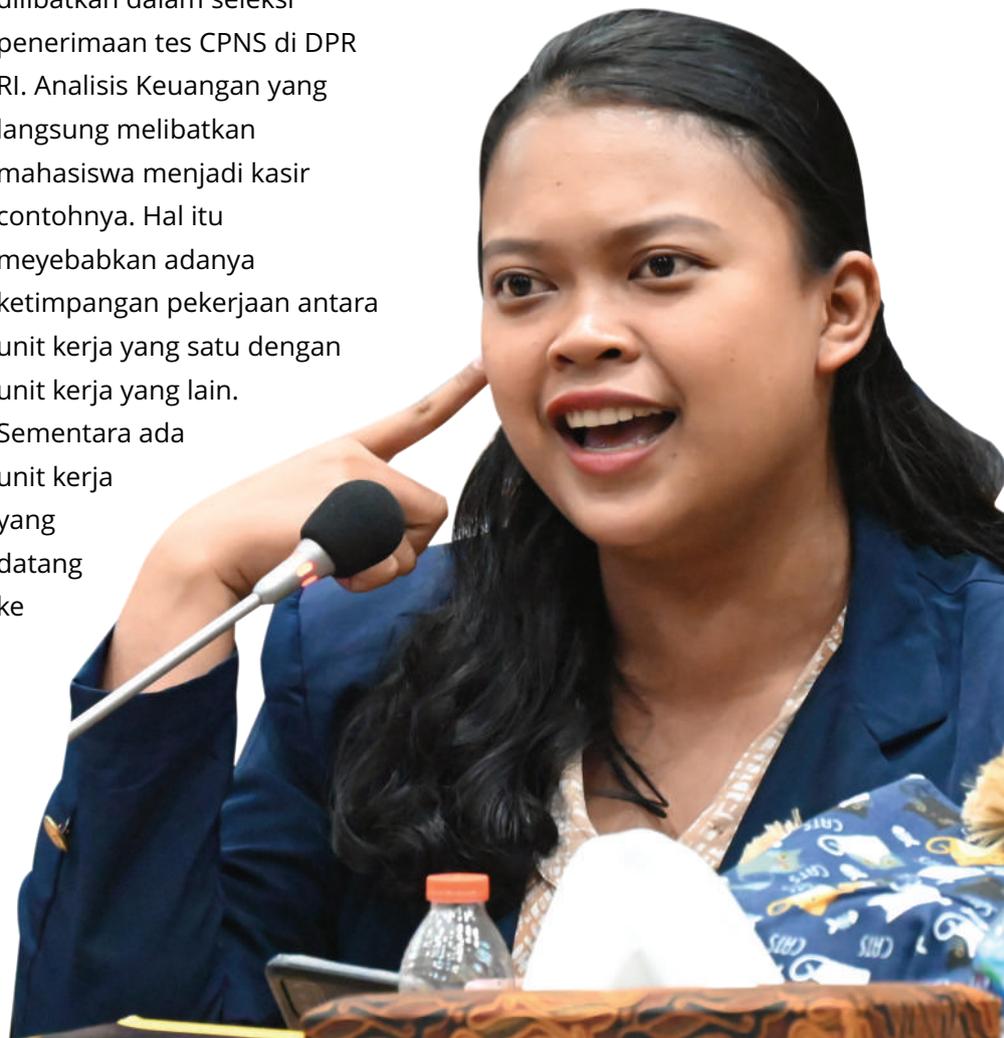
Kata Mereka MAGANG DI RUMAH RAKYAT

Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa agar menguasai berbagai keilmuan untuk memasuki dunia kerja. Mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar prodi dan memasuki dunia kerja. Namun, setelah saya merasakan secara langsung bagaimana sebenarnya proses dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di DPR RI, ada beberapa opini yang akan saya sampaikan diantaranya.

1. Ketimpangan job desc dan pekerjaan antar unit kerja. Kurang lebih 5 bulan magang di DPR RI, saya sempatkan untuk berdiskusi dan bertanya dengan teman-teman magang di unit kerja lain. Saya bertanya kepada mereka terkait job desc dan pekerjaan sehari-hari mereka di unit kerja. Teman-teman magang banyak yang mengatakan bahwa mereka tidak melakukan banyak hal,

hanya menonton rapat dari balkon dan diberikan tugas (tugasnya hampir sama dengan tugas kampus) oleh mentor. Kebanyakan jawaban seperti ini saya dengar dari teman-teman di unit kerja Komisi. Sementara unit kerja lain yaitu badan-bandan, memiliki job desc atau pekerjaan yang lebih banyak. Mereka dilibatkan secara langsung seperti pegawai pada umumnya. Contohnya unit kerja Sumber Daya Manusia Aparatur, mereka dilibatkan dalam seleksi penerimaan tes CPNS di DPR RI. Analisis Keuangan yang langsung melibatkan mahasiswa menjadi kasir contohnya. Hal itu menyebabkan adanya ketimpangan pekerjaan antara unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain. Sementara ada unit kerja yang datang ke

kantor dan tidak melakukan apa-apa. Namun penempatan magang di unit kerja Komisi X sudah cukup baik menurut saya jika dibandingkan dengan unit kerja komisi lainnya. Di Komisi X mahasiswa diajak langsung ikut dalam kunjungan kerja, diajak dan dikenalkan dengan mitra kerja, diizinkan berdiskusi dengan dewan, diberikan kesempatan menjadi moderator dalam audiensi, diajari simulasi rapat dan membuat



Revina Sihombing (Universitas Udayana, Bali)

notulensi rapat dan lain sebagainya. Hal ini sebenarnya sangat diperlukan oleh mahasiswa magang, mengasah soft skill dan hard skill dalam memasuki dunia pekerjaan. Seharusnya di unit kerja lain pun sistem ini diterapkan.

2. Jumlah peserta magang yang diterima (250 mahasiswa) di DPR RI terlalu banyak.

Saya sangat bersyukur bisa lolos magang di DPR RI dengan jumlah pendaftar 25rb lebih dan yang diterima hanya 250



Saya sangat bersyukur bisa lolos magang di DPR RI dengan jumlah pendaftar 25rb lebih dan yang diterima hanya 250

mahasiswa yang menjadi representasi Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Namun menurut saya, perlu dikurangi kuota mahasiswa magang di DPR RI, karena kebanyakan

mahasiswa di unit kerja pun akan membuat mahasiswa itu bingung terkait job desc atau pekerjaan yang akan dilakukan. Akan lebih efektif dibimbing jika per unit kerja ditempatkan 5 mahasiswa dibandingkan 10 mahasiswa atau lebih bahkan ada yang 25 dan 30 mahasiswa. Apa lagi tahun ini (2024) jumlah mahasiswa magang ditambah kuotanya menjadi 350 mahasiswa. Akan lebih sulit untuk mengkoordinasi dengan jumlah mahasiswa yang sangat banyak.

3. Beberapa mentor tidak peduli atau terlalu sibuk. Lagi-lagi saya bersyukur diberikan mentor yang luar biasa dan perhatian di unit kerja Komisi X. Namun saya sempat berdiskusi dengan teman-teman unit kerja lain bahwa mentor mereka jarang bertemu dengan mereka. Saya salah satu Badan Pengurus Harian (BPH) magang di DPR RI batch 3 sehingga beberapa kali mendapat aduan tentang mentor yang kurang responsif di beberapa unit kerja. Alangkah lebih baiknya, dipertanyakan kesanggupan atau kesediaan mentor sebelum dipilih menjadi mentor mahasiswa magang, karena mentor yang kurang responsif sangat

mempengaruhi pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan mahasiswa magang di DPR RI. Menurut saya, mentor menjadi penggerak yang selalu siap mengarahkan dan membawa mahasiswa magang.

4. Jurusan tidak relevan dengan penempatan unit kerja. Ada teman magang saya jurusan hukum tetapi di tempatkan di Komisi IX, jurusan hukum ditempatkan di Pusbangkom, dan lain-lain. Sewaktu pendaftaran, tidak ada pilihan unit kerja komisi tetapi mendaftar di posisi assistant to mp's expert staff. Lalu dari pihak DPR RI yang menempatkan masuk di komisi mana. Namun beberapa mahasiswa ada penempatan unit kerja tidak relevan atau tidak linear dengan jurusan. Meskipun sebenarnya bisa belajar hal baru tetapi alangkah lebih baik dan mempermudah mahasiswa dalam mengikuti magang jika jurusan dan unit kerja satu linear.

Demikian opini yang dapat saya sampaikan terhadap kebijakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di DPR RI. Mohon maaf apailab terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.

Kata Mereka MAGANG DI RUMAH RAKYAT

Secara umum, sebagian mahasiswa termasuk saya, mungkin melihat MBKM sebagai langkah positif menuju peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Program ini diharapkan dapat memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengatur jalannya pembelajaran, mengeksplorasi minat dan bakat, serta meningkatkan keterampilan soft skills.

Namun, ada juga kemungkinan bahwa sebagai mahasiswa saya merasa perlu adanya pembenahan dalam implementasi MBKM. Beberapa mungkin menghadapi kendala terkait administrasi, transparansi, atau kesenjangan dalam akses informasi terkait

program ini. Selain itu, ada juga potensi perbedaan persepsi antara mahasiswa dari perguruan tinggi yang berbeda mengenai manfaat sebenarnya dari MBKM.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bisa dianggap sebagai sebuah peluang yang bernilai. Sejumlah mahasiswa termasuk saya, merasa terbantu oleh jaminan 20 sks yang diberikan melalui program ini, karena hal ini dapat mengatasi kendala konversi sks yang mungkin sulit diperoleh di kampus. Kemungkinan ini memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengejar minat akademis mereka tanpa terlalu terikat pada regulasi kampus yang mungkin menghambat akumulasi sks.

Namun demikian, dalam menyikapi hal ini, perlu juga diperhatikan bahwa implementasi MBKM sebaiknya tetap memastikan bahwa proses pemberian sks ini bersifat adil dan merata di antara semua mahasiswa.

Terdapat kemungkinan bahwa mahasiswa dari berbagai jurusan atau program studi dapat mengalami perbedaan dalam pengakuan sks yang diberikan oleh program ini, termasuk saya yang hanya

memperoleh 3 sks dari pihak kampus untuk program MBKM saya di DPR RI, sedangkan teman-teman saya yang sama halnya dengan saya yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi mendapat jaminan konversi 20 sks meskipun sks nya sudah melebihi ketentuan yang kampus berikan akan tetapi mereka tetap mendapat hak itu sebagai bukti implementasi MBKM. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah termasuk Kemendikbud untuk mengawasi implementasi MBKM secara cermat guna mencegah terjadinya kesenjangan konversi sks yang tidak diinginkan. Perlu ada kebijakan yang transparan dan merata agar manfaat program ini dapat dirasakan secara adil oleh seluruh mahasiswa. Selain itu, pihak kampus juga diharapkan untuk terus meningkatkan sistem konversi sks agar sesuai dengan semangat MBKM untuk memberikan kebebasan belajar kepada mahasiswa.

Pandangan positif saya terhadap Kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan DPR RI menggambarkan apresiasi saya terhadap inovasi dalam pendidikan tinggi. Rincian kegiatan yang melibatkan mahasiswa secara langsung, seperti kuliah umum, audiensi dengan anggota DPR, kunjungan kerja, project



Muh. Farhan (Universitas Negeri Makasar)

magang, dan refleksi ke berbagai tempat, memberikan pengalaman belajar yang mendalam. Kuliah umum dari berbagai pemangku kepentingan, terutama anggota DPR, memberikan wawasan yang tidak dapat ditemukan dalam pembelajaran klasikal termasuk di kampus. Audiensi dengan anggota DPR membuka ruang dialog antara mahasiswa dan pembuat kebijakan, mengajarkan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembuatan keputusan. Kunjungan kerja dan project magang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis mereka dalam konteks nyata, meningkatkan keterampilan praktis yang diperlukan dalam dunia kerja.

Selain itu, refleksi ke berbagai tempat seperti Wisma Griya Sabha DPR RI memberikan nuansa pengalaman yang unik, memperkaya pemahaman saya terhadap dinamika politik dan proses legislatif. Simulasi rapat paripurna menjadi sarana efektif untuk melatih saya dalam berkomunikasi dan berdebat, mengasah kemampuan kepemimpinan saya. Semua kegiatan ini bersifat integratif dan menciptakan iklim pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi yang tidak saya

temukan di kampus.

Dengan demikian, respons positif saya terhadap MBKM menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya memberikan tambahan nilai dalam kurikulum akademis, tetapi juga membentuk karakter saya sebagai individu yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia kerja. Oleh karena itu, menurut saya perlu terus mendukung dan meningkatkan implementasi MBKM untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan bagi mahasiswa, sekaligus mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Dengan memanfaatkan potensi MBKM secara maksimal, diharapkan dapat melahirkan generasi mahasiswa yang tidak hanya memiliki keahlian akademis, tetapi juga memiliki kepemimpinan, keterampilan interpersonal, dan pemahaman mendalam tentang tanggung jawab sosial. Inilah fondasi yang kuat untuk menciptakan lulusan yang siap menghadapi kompleksitas tantangan di dunia nyata dan menjadi motor penggerak perubahan positif dalam masyarakat.

Dan saya sebagai mahasiswa yang telah merasakan langsung manfaat Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui magang di DPR RI,

kekaguman saya semakin menguat terhadap inisiatif ini. Pengalaman magang yang melibatkan berbagai kegiatan, seperti kuliah umum, audiensi, kunjungan kerja, project magang, dan simulasi rapat paripurna, telah membuka mata saya akan kompleksitas dan dinamika dunia politik serta pembuatan kebijakan. Saya tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademis, tetapi juga mengasah keterampilan yang sangat berharga untuk karir saya di masa depan.

Keberhasilan MBKM dalam menciptakan peluang-peluang berharga ini menggambarkan dedikasi penuh dari Kemendikbud dalam memberikan pengalaman belajar yang relevan dan mendalam bagi mahasiswa. Saya merasa bersyukur dan terhormat telah menjadi bagian dari program ini, dan keyakinan saya terhadap peran penting MBKM dalam membentuk generasi mahasiswa yang unggul semakin menguat. Semoga program ini terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih besar lagi bagi dunia pendidikan dan kemajuan bangsa. Terima kasih, MBKM dan Magang Di Rumah Rakyat (MDRR) DPR RI 2023, atas pengalaman berharga ini, yang akan membekas dalam perjalanan pendidikan dan pengembangan pribadi saya.

Kata Mereka MAGANG DI RUMAH RAKYAT

Program MBKM merupakan program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI) dengan tujuan untuk membantu mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi serta skill lulusan sehingga lebih terarah dan relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, program ini diharapkan akan melahirkan lulusan yang siap menjadi pemimpin bangsa yang unggul dan berkepribadian. Terdapat 7 jenis program dalam MBKM, yakni MSIB, PMM, IISMA, Kampus Mengajar, Membangun Desa, Proyek Kemanusiaan, Riset, dan Wirausaha. Seluruh program ini selalu menarik perhatian mahasiswa, serta mitra untuk bekerja sama dalam program MBKM. Salah satu program yang menarik antusias mahasiswa adalah program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB). Pada program ini, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman bekerja diberbagai pilihan Perusahaan atau mitra kerja, dan tentu saja hal ini akan memberikan mereka

gambaran tentang bagaimana mekanisme dunia kerja yang sebenarnya.

MSIB tidak hanya menarik antusias mahasiswa saja, akan tetapi telah berhasil menarik minat dari berbagai Perusahaan, Lembaga, dan lainnya untuk berkerja sama sebagai mitra dalam program ini. Salah satu Lembaga pemerintahan yang juga ikut serta dalam program ini adalah Sekretariat Jendral DPR RI. Dalam pelaksanaannya, Sekjen DPR RI mengemas kegiatan MSIB dengan sebutan “Magang di Rumah Rakyat DPR RI” dengan tema Parliamentary Internship Program (Pattern Pro), yang terbagi atas 6

(enam) kerangka agenda yaitu observasi, kuliah umum, audiensi, magang, simulasi, dan evaluasi, dengan berbagai jenis posisi yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan di unit kerja eselon II.

Kegiatan MBKM di DPR RI melalui program magang ini tentu saja telah membuat kesempatan seluas-luasnya bagi kami mahasiswa, untuk mengenal lebih dalam tentang DPR RI dan kegiatan di dalamnya. Sebagai salah satu peserta MDRR DPR RI, saya menilai bahwa dengan keikutsertaan DPR RI dalam program MBKM melalui

program magang, dapat membantu mereka, untuk perlahan



Zulva Rosari Usman (Universitas Negeri Gorontalo)

memperbaiki citra dan pandangan terhadap DPR RI. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa citra Lembaga ini tidak begitu baik di masyarakat, sehingga, melalui mahasiswa, tentu saja informasi serta pengalaman secara langsung yang mereka dapatkan di DPR RI, kemudian akan membuka pandangan baru tentang Lembaga ini.

Pelaksanaan MBKM di DPR RI, sejatinya telah memiliki program yang telah dipersiapkan dan disusun secara baik oleh pihak pelaksana. Dimana, dalam pelaksanaannya, terdapat

Program magang ini tentu saja telah membuat kesempatan seluas-luasnya bagi kami mahasiswa, untuk mengenal lebih dalam tentang DPR RI

serta aktivitas yang telah diprogramkan untuk diikuti oleh seluruh mahasiswa peserta magang. Kami diberikan

kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan para wakil rakyat, berdiskusi, bahkan membangun relasi. Selain itu, kami juga bisa merasakan bagaimana alur pengambilan Keputusan yang selama ini lahir dari hasil-hasil rapat dan diskusi di ruang sidang DPR RI. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan MBKM di DPR RI, memang terfokus untuk bagaimana agar mahasiswa bisa mengenal lebih dekat tentang DPR RI. Tentu saja, hal ini sangatlah baik dalam prosesnya, akan tetapi menurut saya pribadi masih ada beberapa hal yang

agenda menurut saya perlu diperhatikan, karena terlepas dari suksesnya pelaksanaan program MBKM di DPR RI, tentu saja akan ada hal yang bisa menjadi bahan evaluasi kedepannya. Seperti halnya pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang menjadi pandangan saya terkait hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program MBKM di DPR RI.

Pertama, yakni terkait substansi aktivitas atau agenda selama magang baik di unit kerja atau secara umum. Dalam pelaksanaannya, memang aktivitas yang diprogramkan sudah jelas, akan tetapi dari pribadi saya sendiri berpendapat bahwa aktivitas selama magang akan lebih baik jika lebih dikembangkan lagi. Hal ini dikarenakan, ada beberapa kegiatan yang menurut pandangan saya cenderung berulang-ulang kali dengan isi agenda yang sama dan hanya dibedakan oleh narasumber serta topiknya saja. Hal ini saya utarakan, dengan harapan program ini kedepannya akan menyediakan aktivitas khusus dan beragam bagi para peserta magang, sehingga output yang dihasilkan akan jauh lebih baik. Selain itu, dalam pelaksanaannya saya berharap bahwa MBKM di DPR RI akan secara menyeluruh

mengarahkan peserta di setiap unit kerja untuk mengerjakan project yang bisa dipergunakan atau menjadi output yang dapat ditinggalkan setelah magang selesai. Hal ini tentu dapat menjadi alternatif dalam jenis kegiatan setiap magang, dan pembuatan project ini pun bisa menjadi salah satu hasil nyata dari pelaksanaan MBKM di DPR RI melalui program magang bersertifikat serta dapat mengarahkan mahasiswa untuk memanfaatkan skill serta kreativitas yang mereka punya dan mereka dapatkan selama magang di DPR RI.

Terlepas dari hal-hal tersebut, saya berpandangan bahwa langkah DPR RI dalam ikut serta menjalankan program MBKM dengan menjadi salah satu mitra dalam program magang, sudahlah tepat. Melalui program ini, mahasiswa bisa mendapatkan kesempatan, serta membangun relasi yang belum tentu mereka dapatkan di tempat lain. Selain itu, selebihnya dalam praktiknya, pelaksana program MBKM di DPR RI sudah menjalankan program sesuai dengan mekanisme MSIB. Dimulai dari alur pendaftaran, seleksi, penerimaan awal peserta, pelaksanaan agenda magang, evaluasi, pelaksanaan penutupan, hingga pembagian sertifikat dan nilai akhir dengan proses yang cepat.

Kata Mereka MAGANG DI RUMAH RAKYAT

Keputusan untuk melakukan kegiatan magang mandiri di DPR RI, khususnya di Komisi X datang dari keinginan saya sendiri untuk melihat lebih dekat dinamika pengambilan kebijakan maupun kontestasi politik di tingkat nasional. Sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional, awalnya saya mengira dinamika politik tersebut hanya terkait pada aspek dalam negeri saja. Namun, setelah mengikuti berbagai agenda kegiatan magang di DPR RI, pemahaman saya tentang fungsi legislasi di tingkat nasional nyatanya memiliki keterkaitan dengan dimensi internasional dari dampak signifikan terhadap kedudukan dan peran Indonesia di arena global. Beberapa wawasan baru yang saya dapatkan terutama di Komisi X DPR RI di antaranya adalah mengenai kolaborasi dan diplomasi terkait event internasional di bidang olahraga dan kepariwisataan, pentingnya pendidikan dan budaya dalam soft diplomacy Indonesia, pengaruh isu pemuda dan olahraga dalam diplomasi publik, serta partisipasi perwakilan masyarakat sipil dalam proses

demokrasi. Dengan demikian, magang di rumah rakyat meninggalkan kesan yang cukup unik pada cara berpikir dan sudut pandang saya dalam melihat kepentingan nasional yang beririsan dengan kedudukan Indonesia di mata global.

Terlepas dari kaitan dengan Ilmu Hubungan Internasional, keseluruhan pengalaman magang di DPR RI memberikan kesan positif yang mendalam. Saya merasa beruntung dapat belajar langsung dari para pemangku kepentingan yang memiliki keahlian dan dedikasi dalam bidangnya masing-masing, seperti pendidikan, olahraga, dan pariwisata. Interaksi dengan anggota parlemen dan staf pendukung memberikan wawasan yang komprehensif tentang tantangan dan potensi di berbagai sektor. Terutama ketika mengikuti

rapat kerja terkait isu yang beragam dan juga dekat dengan masyarakat, membuka pemikiran baru dari perspektif berbagai pemangku kepentingan. Pengalaman ini juga mempertemukan saya dengan berbagai tokoh penting di Indonesia yang mungkin akan sulit ditemukan di luar rumah rakyat, di



**Kaneishia
Lathifa Zahra**
(Universitas Indonesia)

antaranya adalah para menteri dan wakil menteri dari mitra kementerian Komisi X DPR RI, anggota legislatif, dan tokoh politik lainnya. Kesempatan berdiskusi secara formal melalui audiensi maupun

senda gurau di luar

Magang di rumah rakyat meninggalkan kesan yang cukup unik pada cara berpikir dan sudut pandang saya dalam melihat kepentingan nasional yang beririsan dengan kedudukan Indonesia di mata global

pertemuan bersama tokoh-tokoh penting juga meninggalkan kesan positif dan cukup tidak terduga selama pengalaman magang saya.

Pesan yang saya ambil dari pengalaman ini adalah betapa pentingnya peran setiap anggota masyarakat dalam mendukung proses legislasi. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam memberikan masukan dan menjalani tanggung jawabnya sebagai

warga negara. Proses demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik jika masyarakat aktif terlibat dalam pembentukan kebijakan. Selain itu, saya menyadari bahwa tugas seorang legislator bukanlah pekerjaan yang mudah. Mereka harus mampu merespons dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah. Oleh karena itu, diperlukan keterbukaan, integritas, dan kemampuan beradaptasi untuk dapat menghasilkan kebijakan yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui pengalaman ini, timbul rasa hormat dan kagum yang semakin tinggi terhadap para elit politik yang selama ini kerap dipandang sebelah mata oleh masyarakat awam tanpa melihat kinerja mereka sebenarnya di rumah rakyat. Begitu juga dengan para staf yang membantu kinerja anggota legislatif yang konon bekerja hingga larut demi menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat.

Salah satu momen berharga selama magang adalah saat saya dapat menyaksikan proses pembahasan di ruang rapat. Diskusi berlangsung intens dan terdapat beragam pandangan dari berbagai anggota. Saya belajar bahwa pengambilan keputusan dalam proses legislasi bukanlah hal yang mudah, melainkan melibatkan pertimbangan yang matang

serta kerja sama yang baik antar anggota. Namun, kesan pertama kali masuk ke ruang Komisi X yang disambut oleh suasana penuh semangat dari peserta magang lainnya juga membuat saya merasa terkesan dengan dedikasi dan komitmen setiap individu dalam menjalankan tugasnya. Dengan ini, saya merasa sangat bersyukur dan berterima kasih pada seluruh mentor dan pihak yang terlibat dalam membimbing kami, mahasiswa magang di rumah rakyat, atas kesempatan dan peluang yang diberikan. Rasa kekeluargaan yang dibangun membuat kami dapat belajar dan bekerja tanpa tekanan. Bahkan mungkin pengalaman ini tidak akan kami dapatkan di instansi lainnya. Bagaimana kami semua dapat duduk makan siang bersama sambil berdiskusi tanpa memandang status sosial maupun kepentingan lain di balik obrolan ringan kami. Oleh karena itu, saya akan terus merekomendasikan program magang di rumah rakyat kepada teman-teman mahasiswa lainnya agar juga dapat merasakan pengalaman berharga seperti apa yang kami lalui. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang saya peroleh ini, sebagai bagian dari generasi muda, saya merasa lebih siap untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.

Kata Mereka MAGANG DI RUMAH RAKYAT

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan sebuah program unggulan dan terobosan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Perguruan Tinggi Republik Indonesia. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan

beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Kebijakan Kampus Merdeka nantinya akan dibagi dalam beberapa sub program salah satunya Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Berbagai mitra baik dari sektor instansi pemerintah, korporasi, NGO sampai start up turut mengambil bagian menjadi wadah penyaluran minat dan ketertarikan mahasiswa diluar kampus. Salah satu mitra yang turut

Program magang ini memberikan pengalaman kepada mahasiswa sebelum masuk dalam dunia industri maupun birokrasi.

berpartisipasi adalah Setjen DPR RI. Adapun program magang ini dikenal dengan program Magang di Rumah Rakyat DPR RI. Program Magang di Rumah Rakyat (MDRR) ini memberikan ruang bagi seluruh mahasiswa di berbagai wilayah di

Indonesia untuk melihat langsung bagaimana konstelasi politik nasional dan berbagai fungsi serta kerja DPR RI. Berdasarkan data terakhir, program Magang di Rumah Rakyat DPR RI diikuti oleh lebih dari 25.000 pendaftar dan hanya total 250 orang yang diterima.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memberikan ruang kepada mahasiswa untuk mengeksplor berbagai kemampuan soft skill dan hard skill yang dibutuhkan. Selain itu mahasiswa akan belajar berjejaring dan terlibat langsung dalam proses politik. Mahasiswa akan ditempatkan di berbagai unit kerja baik



Andre Tubecardo Doloksaribu
(Universitas Sumatera Utara)

itu Alat Kelengkapan Dewan maupun Badan Keahlian Dewan. Kesempatan belajar dan mengambil pengalaman selama kurang lebih lima bulan di DPR RI ini sendiri memberikan kesan yang luar biasa untuk menjadi ruang eksploratif mahasiswa dalam mempelajari politik itu sendiri. Lewat program magang di Rumah Rakyat ini mahasiswa akan menjadi layaknya seorang legislator muda yang memahami peta politik dan peta permasalahan dari masing-masing unit kerjanya. Mahasiswa akan menjadi legislator muda yang memberikan masukan lewat setiap interaksi kepada mentor bahkan anggota dewan sendiri. Kebijakan Program Magang di Rumah Rakyat ini menjadi sebuah program yang harus didukung dan terus disempurnakan mengingat program ini menjadi program yang dapat menjadi mercusuar DPR RI bagi berbagai wilayah di Indonesia. Kesan magang selama lima bulan akan memberikan warna pengalaman yang akan dibagikan peserta magang di daerah asal masing-masing. Dengan demikian kesan yang baik akan memberikan dampak ekor jas yang positif terhadap citra dan penilaian Publik terhadap DPR RI. Sementara itu, bagi mahasiswa,

program magang ini memberikan pengalaman kepada mahasiswa sebelum masuk dalam dunia industri maupun birokrasi.

Meski begitu, program ini juga memiliki berbagai catatan dan masukan agar terus dimaksimalkan. Rangkaian kompetensi dan pemahaman peserta magang harus dipetakan secara jelas dan memiliki targetan-targetan yang rasional dan mumpuni agar mahasiswa Magang di Rumah Rakyat turut memiliki kompetensi khusus dan umum yang diperlukan dalam lembaga legislatif DPR RI. Selain itu, Program MDRR DPR RI harus didukung terus untuk dapat berkelanjutan dan tidak berhenti hanya sekedar magang. Kelanjutan Magang di Rumah Rakyat DPR RI ini perlu menjadi bahan perhatian agar sumber daya manusia hasil seleksi MDRR ini dapat terus berpartisipasi dalam kancah politik ataupun segmentasi politik di tingkat Nasional (DPR RI), Provinsi (DPRD Provinsi) maupun tingkat kabupaten/kota (DPRD Kabupaten/Kota). Untuk itu, kelanjutan dari program Magang di Rumah Rakyat ini harus menjadi perhatian agar dapat diserap dan dapat berpartisipasi dalam dunia politik.

Selain itu, untuk memastikan kekuatan dan sumber daya peserta Magang

di Rumah Rakyat tetap berkelanjutan, perlu dilakukan pembentukan organisasi alumni agar dapat terjaring dan terkoordinasi lebih baik. Pembentukan organisasi alumni ini dapat menjadi wadah lanjutan bagi peserta magang untuk tetap terus berjejaring di lintas angkatan magang maupun terkoordinasi ketika sudah menyelesaikan studi dan masuk dalam dunia kerja.

Magang di Rumah Rakyat ini menjadi program yang harus terus dilanjutkan dan terus dievaluasi sehingga nantinya menjadi prospek unggulan dalam usaha memperkenalkan mahasiswa dalam dunia kerja maupun birokrasi. Kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka- Magang di Rumah Rakyat DPR RI juga harus mendapatkan perhatian agar diberikan kuota yang lebih besar di batch berikutnya dan pemerataan yang berkadilang bagi berbagai daerah di Indonesia termasuk pelosok-pelosok. Kedepannya, setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan magang di Rumah Rakyat DPR RI dapat berkontribusi aktif menjadi calon legislator muda dalam konstelasi politik baik tingkat nasional, provinsi maupun kota/kabupaten. Program ini harus didukung agar menciptakan generasi Emas Indonesia 2045.

Kata Mereka MAGANG DI RUMAH RAKYAT



**Desak Nyoman Devi
Adelia Yusnita**
(Universitas Brawijaya)

Program yang dibuat oleh kemendikbudristek yakni Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan program yang sangat bermanfaat utamanya bagi mahasiswa. Program ini diresmikan pada tahun 2020 dan selama 3 tahun program ini berjalan semakin banyak inovasi yang dilahirkan. Program MBKM memiliki sembilan kegiatan, diantaranya:

1) Magang Studi Independent Bersertifikat (MSIB).

Kegiatan ini merupakan perantara antara mahasiswa yang mencari program magang dan juga mitra Perusahaan. Kegiatan MSIB saat ini terbagi menjadi dua program magang yakni magang mandiri yang mana program magang ini tidak diawasi secara langsung oleh Kemendikbudristek melainkan dikelola langsung oleh

Perusahaan dan magang MSIB yang diawasi langsung oleh Kemendikbudristek. Kemendikbudristek memfasilitasi seluruh mahasiswa di Indonesia yang mengikuti MSIB untuk mempelajari kompetensi yang spesifik, berinteraksi dengan pakarnya, serta mempraktekkan kompetensi tersebut dalam sebuah proyek riil.

2) Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM)

Selanjutnya kegiatan lain dalam Program MBKM adalah Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM), dalam program ini mahasiswa berkesempatan menjelajahi budaya Indonesia yang begitu beragam dengan merasakan berkuliah 1 semester di universitas yang ada di seluruh Indonesia. Berikutnya terdapat Wirausaha Merdeka yang mana program ini bertujuan untuk meningkatkan skill wirausaha untuk mahasiswa mulai dari D2 hingga S3.

3) Kampus Mengajar

Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama satu semester guna melatih kemampuan menyelesaikan permasalahan yang kompleks dengan menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam memberikan proses pembelajaran. Program ini menempatkan mahasiswa di sekolah-sekolah yang berlokasi di

seluruh Indonesia.

4) Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)

Dalam program ini mahasiswa berkesempatan merasa kuliah di luar negeri serta mempelajari budaya yang ada di luar negeri selama satu semester. Selanjutnya terdapat bangkit by google, GoTo, and Traveloka lalu gerilya Kementrian ESDM dua program tersebut merupakan program studi independen khusus.

Kebijakan program kampus Merdeka ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dikarenakan seorang mahasiswa perlu terjun langsung ke dunia kerja dan juga dalam masa- masa kuliah ini seorang mahasiswa perlu memperbanyak pengalaman baru serta memperluas jejaring karena saya rasa pembelajaran yang mahasiswa dapatkan di kampus itu masih terasa kurang untuk menjadi bekal di dunia kerja kelak. Kebijakan MBKM ini Kemendikbudristek memberikan dan membuka berbagai kesempatan yang luas untuk mahasiswa mengeksplor kemampuan yang dimiliki. Namun ada hal yang perlu diperhatikan oleh kemendikbudristek adalah menyesuaikan program di luar kampus dengan kurikulum yang dipakai pada kampus, karena banyak sekali pengalaman mahasiswa yang tidak bisa mengonversi mata kuliahnya karena kegiatan yang diambil tidak relevan dengan program studi yang diambil, akibatnya mahasiswa tersebut terpaksa harus mengulang mata kuliah tersebut di semester berikutnya yang mana memperlambat masa studi.

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan program yang sangat bermanfaat utamanya bagi mahasiswa

Kata Mereka MAGANG DI RUMAH RAKYAT

Kemendikbudristek mengembangkan inovasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai kebijakan untuk mengubah sistem pendidikan tinggi Indonesia untuk memberikan lulusan yang lebih relevan. Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk menghasilkan lulusan Perguruan Tinggi yang sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia kerja, dan dinamika masyarakat. Sejak akhir Januari 2020, Program Kampus Merdeka (MBKM) telah beroperasi.

Laman web Kampus Merdeka Kemendikbudristek mencatat lebih dari 725.000 siswa yang terdaftar dan memiliki akun Kampus Merdeka. Selain itu, 1.300 perguruan tinggi telah berpartisipasi dalam program Kampus Merdeka. Konsep "kampus bebas" pada dasarnya merupakan evolusi dari konsep "kampus bebas" sebelumnya, yang memberikan mahasiswa kesempatan untuk belajar secara mandiri di perguruan tinggi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan Kebijakan Merdeka Belajar yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia termasuk Program Kampus Merdeka Merdeka Belajar (MBKM).

Program ini menawarkan kesempatan kepada siswa untuk terjun ke dunia kerja untuk mempersiapkan karier mereka di masa depan. Kemendikbudristek terus mengembangkan konsep belajar merdeka untuk menghasilkan pemimpin masa depan yang berkualitas, dengan tujuan memungkinkan siswa untuk belajar di luar kampus. Mendikbudristek telah meluncurkan program yang disebut Program Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang bertujuan untuk mendorong siswa untuk memperoleh pengetahuan yang beragam agar mereka dapat beradaptasi dengan dunia kerja.

Dalam upaya



Kurnia Rachmi
(Universitas Negeri Jakarta)

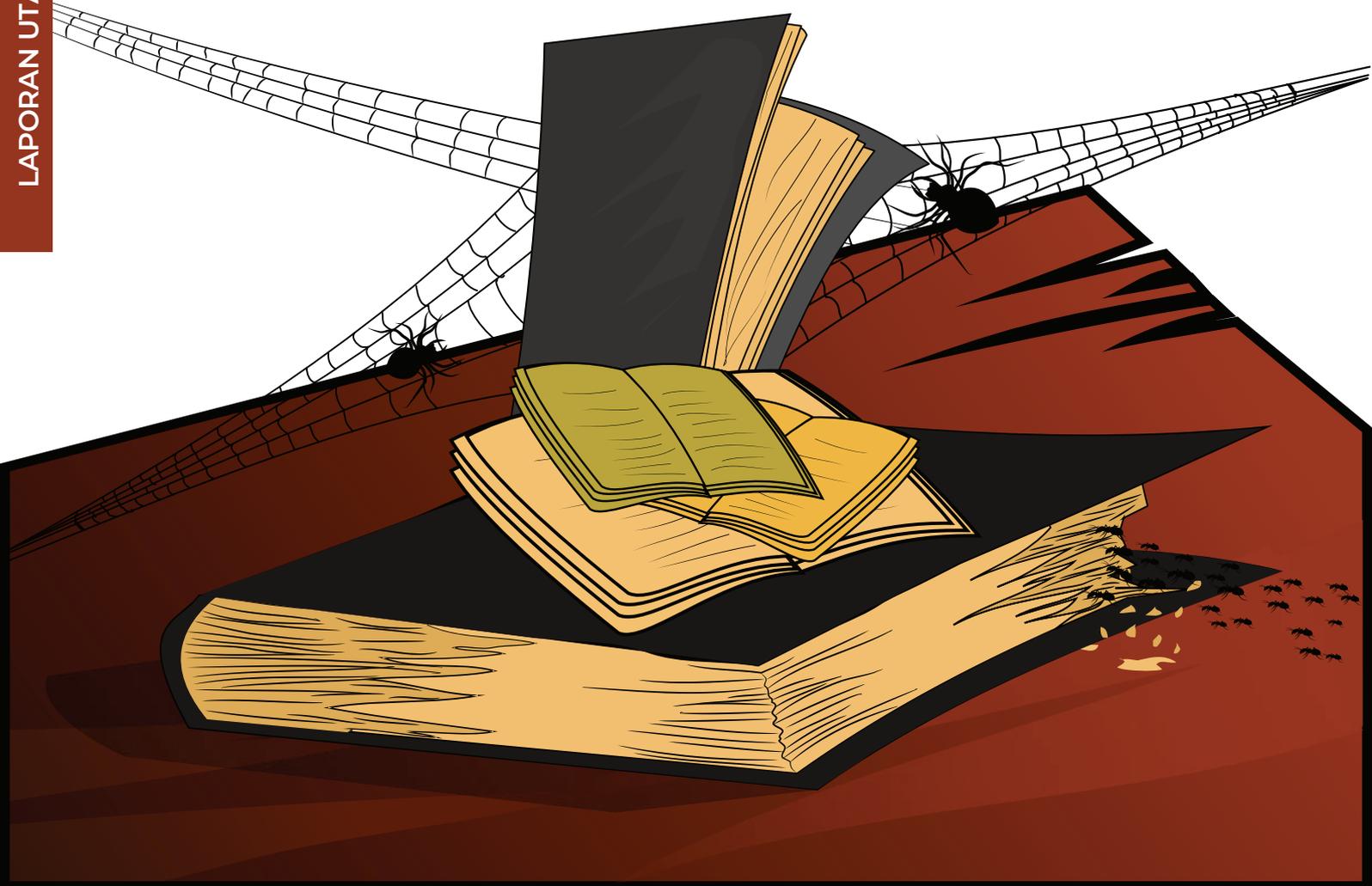
meningkatkan kualitas tenaga kerja manusia, Presiden Joko Widodo memulai Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Untuk mendukung konsep kampus merdeka, hanya perlu mengubah peraturan menteri. Rencananya, konsep kampus merdeka akan segera diterapkan untuk meningkatkan standar pendidikan. Mahasiswa diberi kesempatan melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk belajar di luar program studi di perguruan tinggi yang sama selama 1 (satu) semester, atau setara dengan 20 SKS; paling lama 2

semester, atau setara dengan 40 SKS, belajar di program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau belajar di luar kampus.

Jadi, secara tidak langsung, kebijakan ini akan mengajarkan mahasiswa cara hidup di masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan ini bertujuan untuk mengenalkan dunia kerja pada mahasiswa sejak dini, sehingga mereka lebih siap untuk bekerja setelah lulus dari perguruan tinggi. Pada dasarnya, Mendikbud telah meluncurkan inovasi yang akan memungkinkan siswa untuk belajar di luar kampus selama dua semester. Perencanaan kampus merdeka bertujuan untuk memberi mahasiswa kesempatan untuk memilih kursus yang mereka inginkan.

MBKM di DPR RI, banyak kegiatan yang bervariasi sehingga membuat mahasiswa tidak merasa bosan seperti kuliah umum, audiensi, dan sebagainya

LITERASI YANG TERBAIKAN



Pada tahun 1946, jumlah penduduk yang bisa membaca hanya sebesar 2%, sedangkan angka buta huruf mencapai 98%. Namun kini, meski kondisinya berkebalikan, penduduk yang telah melek huruf lebih dari 98%, namun kemampuan membaca tidak cukup mendorong budaya literasi di masyarakat. Perpustakaan sendirian, tdk mampu sendirian membuka budaya literasi, perlu dorongan dari semua pihak untuk mencapai indeks literasi yang ideal.

Arti “literasi” bukanlah sekedar kemampuan seseorang dalam membaca, menulis dan berhitung, atau sekedar merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami teks tertulis. Secara lebih luas, literasi mencakup kemampuan untuk berbicara, mendengarkan, dan menggunakan bahasa dengan tepat dan efektif. Literasi tidak hanya penting dalam konteks pendidikan, tetapi juga penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pekerjaan, hubungan sosial, dan pengambilan keputusan. Literasi juga dapat merujuk pada pemahaman seseorang tentang topik atau masalah tertentu, seperti literasi finansial yang

merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami dan mengelola keuangan mereka dengan baik, atau literasi media yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami dan menganalisis media yang mereka konsumsi.

Literasi merupakan keterampilan wajib yang harus dimiliki generasi penerus di era global dan modern. Mengacu pada World Economic Forum 2015, cakupan literasi meliputi sains, digital, finansial, budaya dan kewarganegaraan, baca dan tulis, numerasi, dan sains. Keterampilan ini mempunyai empat tingkatan, yaitu kemampuan mengumpulkan sumber bahan bacaan, kemampuan memahami apa

yang tersirat dari yang tersurat, kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan baru, teori baru, dan kreativitas serta inovasi baru hingga memiliki kemampuan menganalisis informasi dan menulis buku, serta menciptakan barang atau jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global.

Survei Program for International Student Assessment (PISA) 2018 menyebutkan, kemampuan membaca pelajar Indonesia belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Indonesia berada pada urutan 74 atau peringkat keenam dari bawah. Sekitar 70% siswa Indonesia belum menguasai kemampuan membaca level dua atau masih berada di bawah kompetensi minimum. Siswa Indonesia memang bagus dalam memahami teks tunggal (single text), tetapi lemah untuk memahami banyak teks (multiple text). Siswa Indonesia pandai dalam mencari, mengevaluasi, dan merefleksikan informasi, tetapi lemah dalam memahami informasi. Berbagai kegiatan literasi digalakkan sejak beberapa tahun terakhir, baik oleh masyarakat maupun melalui lembaga pendidikan, belum membuahkan hasil yang baik. Keberadaan rumah-rumah baca di sejumlah daerah, perpustakaan keliling, Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sejak 2015, hingga gerakan nasional orangtua untuk membacakan buku bagi anak-anaknya (Gernas Buku) mulai 2018 belum mampu membentuk budaya literasi di masyarakat.

Dalam RDP dengan Kepala Perpustakaan RI, Bappenas RI dan Kemendikbud RI tanggal 14 Februari 2023, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bahwa UNESCO tidak menentukan indeks literasi untuk masing-masing negara, karenanya Perpustakaan RI menyusun indeks yang sudah disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia, yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

Dimensi Indeks Literasi Masyarakat (ILM) 2020 meliputi, pertama, kemampuan membaca, menulis, berhitung dan berperilaku berbahasa. Kedua, perilaku

mengakses sumber informasi dan bahan bacaan. Ketiga, perilaku memahami isi bacaan atau informasi. Keempat, perilaku mengemukakan ide atau gagasan, dan kelima, perilaku menciptakan kreasi atau mengembangkan produk/jasa bermutu.

“Program prioritas nasional Perpustakaan RI antara lain adalah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial,” kata Kepala Perpustakaan Syarif Bando. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek RI Anindito Aditomo menambahkan, bahwa penguatan literasi merupakan bagian penting dari tujuan kebijakan dan program-program merdeka belajar. Standar kompetensi lulusan mencakup delapan domain karakter dan kompetensi yang esensial untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dan mampu berpartisipasi dalam masyarakat yang modern, demokratis, dan majemuk. Hal ini tercermin dari arah pelaksanaan Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan, yang meliputi, pertama, evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan perlu mengukur kinerja berdasarkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar untuk mendorong pendidik dan Pemda memprioritaskan penguatan budaya literasi. Kedua, menghasilkan pemetaan literasi di tingkat satuan pendidikan dan daerah sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program dan kebijakan, dan ketiga, capaian literasi setiap satuan pendidikan dan Pemda disampaikan melalui platform Rapor Pendidikan sebagai umpan balik dan bahan perencanaan berbasis data.

Anindito menambahkan, “terkait kebijakan dan program perbukuan, maka penguatan budaya literasi akan didukung kebijakan yang mendorong ekosistem perbukuan untuk menyediakan buku bermutu yang terjangkau di seluruh Indonesia”. Sementara Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek RI Endang Aminudin Aziz, menyampaikan bahwa Program Prioritas badan bahasa, antara lain perlindungan bahasa dan sastra, literasi kebahasaan dan



“

Program prioritas nasional Perpustakaan RI antara lain adalah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial,



“

Penguatan literasi merupakan bagian penting dari tujuan kebijakan dan program-program merdeka belajar

kesastraan, dan internasionalisasi bahasa Indonesia. Ia menjelaskan bahwa literasi kebahasaan dan kesastraan yang baik, dapat membantu anak meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui analisis dan interpretasi teks bacaan, buku bermutu dan berkualitas, mendorong aktivitas membaca dan menulis. Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan dilakukan melalui ketersediaan pilihan buku yang sesuai dengan jenjang pembacanya, dan pengutamaan bahasa negara, dan pembinaan lembaga juga dapat meningkatkan citra profesionalisme.

“Manfaat kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan antara lain meningkatkan kemampuan berbahasa, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kemampuan budaya, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan meningkatkan kemampuan berkreasi”, ungkapnya. Endang menambahkan bahwa buku berperan dalam peningkatan kompetensi literasi antara lain dalam peningkatan kompetensi literasi dan penumbuhan minat baca. Sedangkan Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas RI Subandi, menyampaikan bahwa berdasarkan pencapaian hasil PISA 2003-2018, tren capaian PISA mulai menunjukkan perbaikan di tahun 2015, namun di tahun 2018 mengalami penurunan capaian pada semua bidang yang diujikan.

Pada tahun 2018, kemampuan literasi membaca mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan bidang tes lainnya yaitu mencapai 26 poin dan menjadi capaian terendah selama 15 tahun sebelumnya, lebih dari 50% siswa Indonesia masih memiliki kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains di bawah standar kompetensi minimum (di bawah level 2).

“Nilai budaya literasi dari tahun 2018-2020 memang menunjukkan kenaikan, namun pada tahun 2021, capaian dimensi ini mengalami penurunan. Penyebabnya adalah karena menurunnya

kunjungan perpustakaan yang merupakan salah satu dampak pandemi Covid-19, yaitu 51,60% pada tahun 2020 menjadi 15,08 pada tahun 2021”, kata Subandi.

“Arah kebijakan penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas dalam RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter”, lanjut Subandi.

Pada RDP tersebut, beberapa hal terkait ketersediaan buku dibanding jumlah penduduk, juga cukup memprihatinkan. Menurut Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2020, Perpustakaan RI, data jumlah penduduk Indonesia per Semester 1 Tahun 2020 adalah 270,20 jiwa, sementara ketersediaan buku mencapai 22.318.083 eksemplar. Dari data tersebut maka rasio ketersediaan bahan bacaan adalah 0,09, atau 1 buku untuk 12 orang.

Melihat kondisi ini, peran perpustakaan sebenarnya cukup berat jika harus “sendirian” mengangkat indeks literasi nasional. Agar perpustakaan dapat menjadi institusi yang memfasilitasi terwujudnya inovasi, maka perpustakaan setidaknya harus memiliki informasi (koleksi perpustakaan), tenaga perpustakaan yang profesional dan kompeten, space atau ruang untuk aktivitas publik dan peralatan atau alat-alat yang dapat mendorong terjadinya inovasi atau terciptanya produk jasa.

“ PERAN PERPUSTAKAAN SEBENARNYA CUKUP BERAT JIKA HARUS “SENDIRIAN” MENGANGKAT INDEKS LITERASI NASIONAL



Pemerintah melalui Permendagri 18/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyebutkan indikator-indikator dalam pembangunan perpustakaan. Dua indikator outcome tersebut adalah nilai tingkat kegemaran membaca dan Indeks

Pembangunan Literasi Masyarakat. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk menjadi salah satu indikator kinerja kunci. Dapat dikatakan bahwa, ketercukupan pustakawan berkorelasi dengan tinggi rendahnya minat baca dan pembangunan budaya literasi dan inovasi masyarakat di Indonesia. Sayangnya, kondisi pustakawan pun, juga cukup memprihatinkan.

Berdasarkan Pangkalan Data Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustas, jumlah pustakawan per Januari 2023 berjumlah 4.593 orang yang tersebar di berbagai jenis perpustakaan. Sebagian besar dari jumlah tersebut berada di Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustas dan Perpustakaan Provinsi/Kab/Kota. Pustakawan di Pulau Jawa sejumlah 2.248 dan luar Pulau Jawa sejumlah 2.342. Jumlah Pustakawan ini masih jauh dari cukup, karena jumlah perpustakaan secara nasional adalah 164.610, terdiri dari 113.541 perpustakaan sekolah, 2.057 perpustakaan perguruan tinggi, 42.460 perpustakaan umum, dan 6.552 perpustakaan khusus. Data tersebut juga menunjukkan bahwa meski jumlah perpustakaan sekolah paling banyak, jumlah tenaga perpustakaan pada perpustakaan sekolah relatif sedikit sehingga penyelenggaraan perpustakaan sekolah dilaksanakan oleh guru

atau tenaga teknis. Pustakawan dituntut memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal. Kompetensi profesional mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja, kompetensi personal mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial. Pendidikan untuk memperoleh kompetensi pustakawan juga melalui proses yang panjang, diantaranya melalui Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Saat ini, jumlah PTN atau PTS penyelenggara program studi tersebut adalah 33 perguruan tinggi, dengan rincian 13 Prodi jenjang D3 dan 33 Prodi jenjang S1. Jika diakumulasi jumlah pustakawan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ini, tidak sebanding dengan kebutuhan pustakawan yang dibutuhkan. Perpustakaan sekolah paling sedikit 1 pustakawan, perpustakaan perguruan tinggi dengan rasio setiap 500 mahasiswa paling sedikit 1 pustakawan, perpustakaan kabupaten/kota paling sedikit 1 orang per 75.000 penduduk, perpustakaan provinsi paling sedikit 1 orang per 750.000 penduduk, dan perpustakaan khusus 3 pustakawan. Kurangnya jumlah tenaga perpustakaan tersebut menyebabkan jumlah masyarakat yang dapat menerima manfaat dari keberadaan perpustakaan, menjadi terbatas dan perpustakaan pun mengalami kendala dalam mewujudkan pelayanan prima. Menanggapi hal tersebut, Komisi X DPR RI, meminta agar literasi jangan diabaikan, serta mendesak Kementerian PPN/Bappenas RI dan Kemendikbudristek RI, agar pertama, melakukan sinkronisasi/membuat regulasi agar Perpustas RI dapat memberikan dukungan pengelolaan dan pengembangan koleksi Perpustakaan Sekolah, kedua, agar penentuan indeks literasi tidak hanya merujuk kepada UNESCO tetapi juga berdasarkan Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat yang dirumuskan oleh Perpustas RI, dan ketiga, agar pustakawan menjadi prioritas pengadaan tenaga kependidikan pada tahun anggaran yang akan datang berdasarkan peta kebutuhan pustakawan yang disusun oleh Perpustas RI.

“
**JIKA
DIAKUMULASI
JUMLAH
PUSTAKAWAN
YANG
DIHASILKAN
OLEH
PERGURUAN
TINGGI INI,
TIDAK
SEBANDING
DENGAN
KEBUTUHAN
PUSTAKAWAN
YANG
DIBUTUHKAN**

“

Perlu dilakukan koordinasi antara Perpustakaan Nasional, Kemenpan RB, dan Perpustakaan Daerah, untuk mengatur mengenai keberadaan pustakawan yang sampai saat ini tidak memiliki induk di sekolah



Komisi X DPR RI juga Mendorong kerjasama dengan K/L lain yang memiliki program literasi untuk menyepakati lembaga yang akan memimpin pelaksanaan program-program literasi dan menyusun pedoman pelaksanaannya. Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih menyampaikan perlunya alat ukur literasi, agar ukuran literasi lebih objektif, sehingga semua K/L perlu terlibat dalam literasi ini.

“Terkait pustakawan, perlu dilakukan koordinasi antara Perpustakaan Nasional, Kemenpan RB, dan Perpustakaan Daerah, untuk mengatur mengenai keberadaan pustakawan yang sampai saat ini tidak memiliki induk di sekolah. Selain itu, mengingat sebanyak 33 Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta memiliki prodi Perpustakaan, maka perlu dipikirkan output dari Prodi tersebut,” lanjut politisi PKS ini.



Politisi PDIP Sofyan Tan berpendapat, diperlukan dukungan anggaran agar literasi dapat meningkat: “diperlukan juga sinergi antara Bappenas dan Kemenkeu RI”, tuturnya. Hal senada juga disampaikan Politisi PDIP yang lain, Rano Karno, bahwa Perpustakaan memerlukan anggaran yang memadai untuk meningkatkan literasi.

Anggota Fraksi Golkar Purnomosidi mengatakan, literasi harus membawa pada keuntungan ekonomi. Hal yang sama disampaikan oleh anggota lainnya, Ratih Megasari Singkaru dari Fraksi Nasdem. Sementara Politisi PAN Zainuddin Maliki, mengatakan bahwa literasi menjadi pintu utama untuk melahirkan manusia yang unggul dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. “Literasi juga berkorelasi dengan nilai ekonomi”, lanjut Maliki, “jika tugas literasi ini selesai, maka bangsa ini akan

menjadi manusia unggul yang menjadi bangsa terdepan di deretan Asia”.

Dalam RDP tersebut, Komisi X mendorong, pertama, agar Kepala Perpustakaan Sekolah memiliki kompetensi dan penilaian kinerjanya sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana amanat UU 43/2007 tentang Perpustakaan dan tidak hanya dinilai berdasarkan Permendiknas 24/2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah. Kedua, menambahkan indikator kualitas pengelolaan perpustakaan sekolah sebagai bagian dari penilaian kinerja Kepala Sekolah, dan ketiga, mengevaluasi kurikulum PAUD, agar pengenalan/penumbuhan budaya literasi tidak dimulai dengan membaca atau menulis namun melalui kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan mental anak.



Upaya Meningkatkan Mutu dan Relevansi Perguruan Tinggi

Pada 14 Februari 2023, Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR R berhasil menyelesaikan tugasnya, merumuskan laporan Panja dan memberikan catatan rekomendasi kepada Pemerintah. Panja Perguruan Tinggi (PT) telah bekerja kurang lebih selama enam bulan sejak tanggal 22 Agustus 2022, dan telah mengadakan empat belas kali RDP/U dengan berbagai pemangku kepentingan seperti, beberapa PTN, PTS, pakar Pendidikan Tinggi, APTISI, Badan dan Lembaga Akreditasi, beberapa Alumni dan BEM, Forum Guru Besar dan Doktor Indonesia, dan lain-lain. Panja PT juga telah mengadakan sembilan kali Kunjungan Spesifik. Berikut beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dicatat untuk InfokomX.

Kesimpulan pertama adalah terkait kesenjangan akses mahasiswa dalam menempuh pendidikan di PT. Meski secara nasional akses ke PT telah mencapai target RPJMN 2024 (APK rerata Nasional 39,37%), namun akses tersebut belum merata antar provinsi. Kesimpulan ini terkait dengan kesimpulan lain, dimana terdapat indikasi adanya keterbatasan peluang PTS untuk mendapatkan penerimaan mahasiswa baru karena adanya jalur mandiri yang dibuka di PTN.

Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2020, kuota untuk jalur

mandiri PTN dibatasi maksimum 30% dari daya tampung, yang diselenggarakan antara bulan Juni sampai Juli tahun berjalan.

Berdasarkan peraturan tersebut, permasalahan PTS dalam penerimaan mahasiswa baru, bukan karena adanya jalur mandiri tetapi berdasarkan kebutuhan dan pilihan masyarakat terhadap perguruan tinggi yang berkualitas (PTN). Terdapat beberapa langkah strategis yang harus dilakukan, diantaranya PTS perlu meningkatkan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi agar setara dengan PTN, termasuk

menghindarkan perguruan tinggi dari orientasi bisnis dan mengembalikan prinsip pengelolaan perguruan tinggi berbasis nirlaba.

Selain itu, perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap penerimaan mahasiswa jalur mandiri pada PTN. Terdapat indikasi di PTN pada jalur mandiri untuk kepentingan golongan atau sebagai sumber pendapatan Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi didorong untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan non-UKT. Terkait hal ini, Dede Yusuf selaku

Ketua Panja, sempat mengingatkan bahwa, “belajar dari kasus Universitas Lampung, maka Kemendikbudristek perlu untuk menyusun Standar Operasional Prosedur untuk seleksi mandiri di tingkat nasional”.

Dede Yusuf menyebutkan, “SOP ini perlu memuat transparansi, objektivitas, baik dari sisi penilaian maupun biaya sebagai bentuk pengawasan terhadap penerimaan mahasiswa jalur mandiri di PTN”.

Kedua adalah kesimpulan terkait anggaran pendidikan. Peluang anggaran yang dapat diakses PTS dan PTN melalui APBN semakin berimbang.

APTISI dalam RDP dengan Panja, sempat menyebut bahwa anggaran pendidikan di APBN sangat tidak adil bagi PTS. Ketidakseimbangan (inequalities) antara PTN dan PTS yang antara lain terlihat dari dikotomi PTN-PTS yang ditunjukkan oleh pola belanja negara, khususnya di Kemendikbudristek RI. APTISI melalui Prof. Budi Djatmiko menyebutkan “bantuan bahwa bantuan APBN untuk PTS sangat minim, hanya sekitar 6%, jika dibandingkan dengan anggaran untuk PTN (94%)”.

Hal ini dibantah oleh Pemerintah. Plt Dirjen Dikti



Kemendikbudristek Prof. Nizam yang menyebutkan, bahwa pemerintah telah menyeimbangkan anggaran pendidikan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan. Proporsi anggaran untuk PT dilakukan secara kompetitif yang terbuka, baik bagi PTN maupun PTS, diantaranya melalui berbagai program seperti Matching Fund (53% PTNBH, 30% PTS, 2% PTN

“ TERDAPAT INDIKASI DI PTN PADA JALUR MANDIRI UNTUK KEPENTINGAN GOLONGAN ATAU SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN PERGURUAN TINGGI

Satker, 15% PTN BLU), Kompetisi Kampus Merdeka (58% didominasi oleh PTS), Pendanaan Penelitian (38% PTS, 26% PTN, dan 36% PTNBH), dan Pengabdian kepada Masyarakat (67% PTS, 21% PTN, dan 12% PTNBH), bantuan pemerintah kepada PTN dan PTS TA 2022 pada Direktorat Belmawa (37% PTN dan 63% PTS), KIP Kuliah (45% PTN dan 55% PTS). Total alokasi anggaran untuk pengembangan PTN dibanding dengan PTS adalah 56%:44%.

Dede Yusuf mengatakan, “berdasar data yang disajikan

“ BELUM SEMUA PTS MEMILIKI DANA ABADI (ENDOWMENT FUND)

Kemendikbudristek tersebut, menunjukkan bahwa tidak benar jika PTS hanya mendapat 6% dari APBN. Upaya penggunaan anggaran pendidikan di APBN untuk PTN maupun PTS telah diupayakan lebih seimbang.”

Masih terkait anggaran, disimpulkan bahwa ternyata belum semua PTS memiliki dana abadi (endowment fund) sehingga didorong untuk mengembangkan sumber dari hilirisasi riset kampus, dana



masyarakat, termasuk sektor swasta dan filantropi.

Ketua Panja Dede Yusuf juga menambahkan, “Yayasan adalah foundation, maka ia harus mampu menjadi pondasi sebuah karya sosial. Bagi yayasan yang membuka kampus, dana abadi ini adalah konsekuensi, agar mampu memajukan kualitas kampusnya”.

Anggaran pula yang menyebabkan munculnya kemahalan biaya kuliah. Terjadi penurunan jumlah mahasiswa baru yang mendaftar, terutama di PTS, sejak terjadinya pandemi. Dibutuhkan solusi agar ada penyerderhanaan biaya kuliah dan/atau memperbesar beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu maupun yang berasal dari 3T. Berdasarkan data, pendanaan bantuan UKT terhadap mahasiswa melalui KIP Kuliah untuk PTS, telah tersedia dengan proporsi 55% untuk PTS dan 45% untuk PTN meski masih diperlukan penambahan alokasi beasiswa.

Ketiga, banyak PT yang belum terakreditasi (36%), terutama pada PT Agama (40%), PT K/L (21%), PTS (35,6%), dan PTN (7,6%). Profil ini menunjukkan bahwa pengelolaan (manajemen) perguruan tinggi belum sesuai dengan kriteria yang mengacu pada SN Dikti, sehingga perlu menjadi prioritas untuk diselesaikan. Selain itu, profil PT menunjukkan bahwa jumlah PTN dibawah Kemendikbudristek (125 PTN), jauh lebih rendah daripada PTN yang berada dibawah Kemenag (85 PTN) dan K/L lain (135 PTN).

Kemendikbudristek sebagai leading sector bidang pendidikan, seharusnya mendapatkan porsi yang lebih besar. Perlu ada kebijakan dan pengaturan terkait pendirian Perguruan Tinggi dibawah satu pintu Kemdikbudristek.

Terkait akreditasi, muncul pula kesimpulan yang menyebutkan bahwa biaya akreditasi Prodi melalui LAMPT dinilai sangat memberatkan. Terkait hal ini, Kemendikbudristek telah menyiapkan dana bantuan akreditasi Prodi melalui LAM khusus untuk PTS sejumlah Rp23,5 Miliar namun baru terserap Rp8 Miliar. Ternyata tidak seluruh pendanaan dapat dimanfaatkan oleh PTS.

Kemdikbudristek perlu melakukan sosialisasi lebih luas dan intensif kepada penerima sasaran, yaitu PTS. Terkait ketersediaan anggaran bantuan akreditasi ini, Dede Yusuf menyatakan keterkejutannya. "Dari dana bantuan yang disiapkan sejumlah Rp23,5 Miliar namun baru terserap Rp8 Miliar ini, menunjukkan bahwa sosialisasi kepada PTS sangat minim. PTS mungkin saja tidak tahu ada anggaran bantuan akreditasi, atau bagaimana?" ujar Dede Yusuf, "Kemdikbudristek wajib melakukan sosialisasi kembali, dan pendampingan, agar dana bantuan ini benar-benar dimanfaatkan PTS. Jangan dana yang kita siapkan sia-sia."

Keempat, permasalahan yang paling menonjol terkait mutu pendidikan tinggi adalah kualitas, kuantitas dan distribusi dosen dan tenaga kependidikan, kesejahteraan,



kesulitan mengejar studi lanjutan, pengembangan karier, dan sempitnya jejaring. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan mekanisme kenaikan pangkat dan sertifikasi, perluasan jangkauan penerima beasiswa, perluasan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Selain itu, juga diperlukan ketegasan aturan tentang proses seleksi calon guru besar, terutama pada penilaian karya ilmiah yang telah masuk dalam jurnal terindeks scopus, khususnya terkait dengan (1) kualitas publisher, (2) korespondensi, (3) diskontinu, (4) karya ilmiah bagian daripada disertasi, dan (5) penerimaan artikel yang lolos hanya sekali mendaftar (submit) jangan dianggap sebagai publisher yang tidak kredibel.

Kelima, kesimpulan terkait pembelajaran, menyebutkan bahwa PT harus mulai menggunakan MOOCs

(Massive Online Open Courses) sebagai penyedia materi pembelajaran dan keterampilan secara daring. Pandemi telah mendorong sektor pendidikan tinggi untuk mengembangkan learning management system yang berisi berbagai materi pembelajaran online, termasuk MOOCs. Kemdikbudristek dan Perguruan Tinggi telah mengembangkan berbagai platform learning management system (misalnya, SPADA), namun perlu kajian efektifitas terhadap penggunaan dan dampaknya.

Sementara dalam proses pembelajaran di PT Vokasi, ditemukan kendala akibat tiadanya peta dan format kebutuhan dunia usaha dan industri dan kebutuhan masyarakat, dengan kemampuan PT vokasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Permasalahan PT Vokasi yang menonjol adalah banyaknya peralatan yang perlu pemutakhiran sesuai perkembangan teknologi. Kendala kualitas, kuantitas dan distribusi dosen vokasi, juga masih dialami, sehingga Dirjen Vokasi perlu menyusun peta jalan/blue print Pendidikan Vokasi untuk dapat menjawab tantangan perubahan global dunia kerja di era revolusi industri 4.0 dan revolusi sosial 5.0.

Terkait program MBKM, terdapat kesimpulan yang menyebutkan bahwa kebijakan MBKM yang diluncurkan Kemendikbudristek belum dapat diterima secara merata oleh seluruh unsur/elemen Perguruan



“

BANYAK PT YANG BELUM TERAKREDITASI (36%), TERUTAMA PADA PT AGAMA (40%), PT K/L (21%), PTS (35,6%), DAN PTN (7,6%).

Tinggi terutama dosen pengampu mata kuliah, sehingga menjadi hambatan dalam konversi SKS.

Untuk membangkitkan semangat berprestasi, perlu diciptakan iklim akademik yang berkualitas, kampus harus memfasilitasi mahasiswa untuk berprestasi, mengapresiasi mahasiswa berprestasi, menggelorakan output dari berprestasi, dan mempertegas apresiasi mahasiswa berprestasi melalui skema kebijakan. Kebijakan MBKM merupakan program untuk memfasilitasi berbagai skema tersebut. Dampak MBKM menurut Kemdikbudristek, terbukti dapat menurunkan masa tunggu 4 kali lebih cepat dibanding rerata nasional dalam mendapatkan pekerjaan, dan meningkatkan gaji pertama 3 kali gaji pertama setelah lulus.

Namun, dampak tersebut belum merata pada lulusan PT, sehingga perlu dorongan untuk menginternalisasikan skema MBKM di dalam Perguruan Tinggi agar dapat berkelanjutan. Beberapa hal yang perlu dikembangkan di PT diantaranya, penyesuaian kurikulum yang lebih fleksibel untuk dapat memfasilitasi pengembangan minat dan bakat mahasiswa dalam mengaktualisasikan kompetensi baru yang dibutuhkan, termasuk fundamental skill dan soft skill, untuk dapat mengisi tuntutan dunia kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan (wirausaha). Selain itu, perlu mengembangkan sistem MBKM mandiri yang terintegrasi dengan sistem akademik di Perguruan Tinggi. Keenam, terkait kerjasama internasional, beberapa catatan yang perlu diperhatikan diantaranya adalah perlunya pembatasan layanan pendidikan yang diberikan PT Asing, perlunya dukungan kemudahan perizinan dosen asing mengajar di institusi lokal dan/atau melakukan riset bersama ke Indonesia dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, perlunya peningkatan branding Indonesia menjadi negara destinasi pendidikan tinggi, dan perlu menjembatani PTS dengan berbagai lembaga internasional.

Kesimpulan lainnya, menyebutkan bahwa terdapat kendala dalam pembentukan PTN Baru

maupun pengembangan PTN BLU menjadi PTNBH. Kendala PTN Baru diantaranya regulasi dan program-program di bidang pendidikan yang menyamaratakan kondisi dan tuntutan terhadap PTN Satker dan PTN Baru dengan PTN BLU dan PTNBH.

Permasalahan PTN baru di bidang sumberdaya manusia, diantaranya tidak diperbolehkannya merekrut Pegawai Non-ASN dikarenakan kebijakan MenpanRB, bahwa pada Tahun 2023 sudah tidak ada lagi Pegawai dengan status Non ASN di pemerintahan (PP 49/2018).

Kesimpulan berikutnya, menyebutkan bahwa PT relatif belum dapat bersaing di tingkat Dunia. Peningkatan QS WUR 2022, menyebutkan lima PTNBH masuk dalam 500 besar QS WUR dari 4.523 PT. Walaupun hal ini merupakan capaian signifikan dari perkembangan PT Indonesia, namun jika dibanding dengan PT di Asia Tenggara, jumlah ini relatif lebih kecil. Terkait hal ini, disimpulkan pula bahwa PT yang mempunyai otonomi yang lebih luas, terbukti dapat mengakselerasi kualitasnya sehingga dapat menjadi WCU.

Terkait hal ini, Komisi X mendorong Pemerintah meningkatkan PT berkelas dunia (WCU) dengan cara memberikan komitmen dan pendanaan untuk pengembangan PTN maupun PTS.

Dede Yusuf mengusulkan agar klastering/kelas PT tetap ada dan fokus pada tugasnya, yaitu high PT perlu fokus kepada riset, middle PT fokus kepada student body dan peningkatan mutu, dan low PT fokus kepada peningkatan APK dengan peningkatan kuantitas dan kualitas dosen.



“Kebijakan MBKM yang diluncurkan Kemdikbudristek belum dapat diterima secara merata oleh seluruh unsur/elemen Perguruan Tinggi”



“Perlunya peningkatan branding Indonesia menjadi negara destinasi pendidikan tinggi, dan perlu menjembatani PTS dengan berbagai lembaga internasional”

Terakhir, Komisi X mendorong Kemdikbudristek untuk melakukan koordinasi dengan Kemenkeu RI terkait pengurangan/pembebasan pajak bagi penyelenggaraan PT, karena beban PT sangat besar untuk meningkatkan APK.

Guru Bukan Beban Tapi Investasi Bagi Generasi Bangsa

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengingatkan Pemerintah Indonesia bahwa guru bukan beban negara, melainkan investasi untuk generasi muda bangsa. Pasaunya, Hari Guru Nasional (HGN) kerap diwarnai dengan cerita sedih kehidupan para pendidik yang sulit kehidupan yang layak di tanah air akibat rendahnya gaji yang diperoleh.

Maka dari itu, Politisi Fraksi PKB itu mendorong Pemerintah Indonesia senantiasa memperjuangkan kepastian status sekaligus kenaikan gaji bagi para guru di Indonesia. Dua hal ini, menurutnya, harus diupayakan bersama.

“Jika pengeluaran negara untuk para pendidik masih dipandang sebagai beban daripada investasi, maka upaya meningkatkan kualitas guru termasuk

kesejahteraan hidup mereka tidak akan bisa diwujudkan dalam waktu dekat,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Minggu (26/11/2023).

Ketika mendampingi Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam Peringatan Hari Guru di

Purwakarta pada Sabtu (25/11/2023) lalu, dirinya mengungkapkan ada beberapa indikasi yang



“
SIKAP
PEMERINTAH
DAERAH YANG
KURANG
RESPONSIF
DALAM
MENDORONG
SERTIFIKASI
GURU JUGA
MENJADI
INDIKATOR
NYATA JIKA
MEREKA
MELIHAT GURU
INI SEBAGAI
BEBAN
DARIPADA
INVESTASI

SYAIFUL HUDA
Ketua Komisi X DPR RI
Fraksi Partai PKB
Foto: Ruslan

menunjukkan jika negara masih melihat guru sebagai beban dibandingkan investasi.

Pertama, hampir 12 tahun terakhir Pemerintah Indonesia melakukan moratorium pengangkatan guru sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kedua, upaya untuk mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pun berjalan lamban.

“Sikap pemerintah daerah yang kurang responsif dalam mendorong sertifikasi guru juga menjadi indikator nyata jika mereka melihat guru ini sebagai beban daripada investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di tanah air,” katanya.

Kesalahan cara pandang pemerintah tersebut, terang Huda, berimbas berlarutnya upaya meningkatkan kualitas pendidik di tanah air. Situasi ini memberikan efek domino terhadap sulitnya meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air.

“Bagaimana bisa mengejar ketertinggalan kualitas dan mutu pendidikan kita dengan negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia jika guru sebagai pilar utama pendidikan masih bergelut dengan masalah pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” katanya.

Ia mengungkapkan dengan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN setiap tahun harusnya bisa menjadi katalisator penyelesaian masalah kesejahteraan guru. Hanya saja dalam praktiknya anggaran pendidikan belum sepenuhnya untuk fungsi pendidikan.

“20 persen APBN itu cukup besar. Tahun ini saja anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp612,2 triliun lalu tahun depan meningkat menjadi Rp660,8 triliun. Dengan anggaran sebesar itu jika guru menjadi prioritas kebijakan maka saya yakin persoalan kesejahteraan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidik di Indonesia bisa terselesaikan,” katanya. (ts/rdn)

Kecerdasan Artifisial Pacu Perbaharui Pendidikan Indonesia Sambut Indonesia Emas 2045

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendukung program digitalisasi sekolah untuk mengakselerasi implementasi agenda pendidikan nasional demi menyambut generasi emas yang akan terjadi pada tahun 2045. Ia menilai sistem pendidikan nasional yang modern perlu melibatkan kecerdasan artifisial.

Ia menilai kecerdasan artifisial perlu dimanfaatkan untuk menciptakan efektivitas kerja stakeholder pendidikan. Sebab itu, dirinya mengingatkan segenap elemen Pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan perangkat pendukung yang mumpuni.

“Sebagai respon,

pemerintah diharapkan mengambil langkah strategis, seperti penyediaan akses gratis, pengembangan platform pembelajaran daring, dan pematapan konektivitas digital,” terang Hetifah yang dikutip Parleментарia, Selasa (9/1/2024).

Bagi politisi Fraksi Partai Golkar itu, kebijakan yang didukung oleh teknologi berbasis digital seperti kecerdasan artifisial berpotensi membawa sejumlah manfaat. Mulai dari, penghematan biaya operasional, peningkatan

layanan, dan

pengambilan

keputusan berdasarkan data.

Walaupun begitu, ia menekankan upaya ini juga harus

diselaraskan dengan pengawasan dan penegakan hukum yang adil.

Perlu diketahui, dukungan kecerdasan artifisial termasuk machine learning dan deep learning membantu dapat mempercepat proses analisis data terkait administrasi pendidikan. Tidak hanya itu, penggunaan chatbot, asisten virtual, dan pengolahan bahasa alami bisa mendukung penyelenggaraan agenda pendidikan hingga ke tingkat sekolah. (ts/rnm)

“

TEKNOLOGI BERBASIS DIGITAL SEPERTI KECERDASAN ARTIFISIAL BERPOTENSI MEMBAWA SEJUMLAH MANFAAT

Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP
Wakil Ketua KOMISI X DPR RI
Fraksi Golkar Dapil Kaltim
Foto: Ruslan



Jangan Sekadar Jadi Hiburan, Budaya dan Pariwisata Harus Miliki Benang Merah

Komisi X DPR menegaskan bahwa Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan) kini sedang berupaya memperkuat dan mempertajam beberapa substansi regulasi. Satu di antara substansi itu adalah mengenai relasi hubungan budaya dan pariwisata di Indonesia. Hal ini menjadi sorotan lantaran pihaknya meyakini budaya yang lestari berpotensi menciptakan ciri khas pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan.

Sebab itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi setiap masukan dan aspirasi yang disampaikan. Salah satunya berasal dari jajaran pimpinan Politeknik Pariwisata Bali, Politeknik Pariwisata Medan, Politeknik Sahid, Politeknik

Pariwisata
Makassar,
Institut Seni
Indonesia
Yogyakarta,

**AGUSTINA WILUJENG
PRAMESTUTI, SS, MM**
Wakil Ketua KOMISI X DPR RI
Fraksi PDI-P Dapil. Jateng I.
Foto: Ruslan

dan Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Sebagaimana disampaikan dalam Rapat Panja RUU Kepariwisataan Komisi X di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

“Di Panja (Pariwisata) ini, kami sedang berusaha menarik benang merah untuk menggabungkan budaya dan pariwisata. Jangan sampai budaya kehilangan ruh, kami tidak ingin pariwisata di Indonesia hanya sekadar dijadikan sebagai hiburan saja. Menemukan pola relasi budaya dan pariwisata untuk pembahasan RUU ini bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, kami juga mengundang berbagai macam pakar,” tutur Agustina.

Berdasarkan laporan terbaru yang diterimanya, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai pariwisata di

Indonesia masih sangat minim berorientasi pada culture-based tourism. Ia pun khawatir pariwisata di Indonesia akan kehilangan identitasnya. Oleh karena itu, sinergi dan keterpaduan harus menjadi tolak ukur untuk menciptakan relasi kuat antara pariwisata dan budaya.

“Nilai-nilai keseimbangan, sinergitas, dan keberlanjutan dua sisi tersebut menjadi tolak ukur dalam membangun peradaban sektor pariwisata Indonesia ke depan. Revisi UU ini akan menekankan perlunya memasukkan substansi budaya dalam regulasi kepariwisataan, tanpa harus bertentangan dengan UU Nomor 5 tahun 2017 Tentang Kemajuan kebudayaan dan UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya,” pungkas legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV itu.

Usai forum tersebut, Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti setiap masukan dan aspirasi yang disampaikan. Harapannya, hal tersebut akan menjadi landasan kajian untuk penyempurnaan rumusan substansi RUU Kepariwisataan. (ts,mag/rdn)

“

**MENEMUKAN POLA
RELASI BUDAYA
DAN PARIWISATA
UNTUK
PEMBAHASAN RUU
(KEPARIWISATAAN)
INI BUKANLAH HAL
YANG MUDAH**



Digugu dan Ditiru, Komisi X Ingatkan ASN Pendidik Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024

Baru-baru ini beredar video oknum tenaga pendidik (guru) berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Tasikmalaya yang secara terang-terang mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengingatkan agar ASN menjaga kode etik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam aturan tersebut termaktub bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Meskipun sejatinya ASN memang memiliki hak pilih

dalam setiap pesta demokrasi yang berlangsung.

“ASN harus jaga netralitas, apalagi sebagai

**“
ASN HARUS
JAGA
NETRALITAS,
APALAGI
SEBAGAI GURU
YANG
SENANTIASA
DIGUGU DAN
DITIRU,
SELAYAKNYA
MEMBERI
CONTOH YANG
BAIK SECARA
HUKUM MAUPUN
ETIK**

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM
Wakil Ketua KOMISI X DPR RI Fraksi PKS
Dapil Jateng IX. Foto: Ruslan



guru yang senantiasa digugu dan ditiru, selayaknya memberi contoh yang baik secara hukum maupun etik,” ungkap Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlemen, Rabu (10/1/2024).

Sebelumnya, diketahui, salah seorang oknum guru yang terkonfirmasi berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Sekolah Dasar Negeri di Taman Sari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat membuat video dukungan untuk salah satu capres-cawapres secara terang-terangan sambil bernyanyi. Terpantau viral dengan durasi 4 menit 28 detik pada Sabtu (6/1/2024) lalu, video tersebut

menampilkan gerakan menyanyi dan menari sambil menyatakan dukungan.

Turut mengacu pada ketentuan SKB Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Fikri menekankan bahwa ASN dilarang melakukan kampanye melalui deklarasi dukungan, maupun mengajak masyarakat dalam kontestasi politik termasuk: pemilihan presiden, pemilu legislatif, maupun pemilihan kepala daerah.

“ASN harusnya netral dan tetap menjaga netralitas serta kondusifitas pemilu, sehingga pelanggaran tersebut harus segera diberi sanksi yang memberi efek jera, dan agar tidak ditiru oleh ASN lainnya di manapun, terlebih kalangan pendidik,” terangnya.

Politisi Fraksi PKS itu mengingatkan sektor Pendidikan harusnya memberi contoh terbaik dalam konteks berdemokrasi di negara ini.

Sebagai contoh, dengan membangun dialektika demokrasi di kalangan pendidik dan akademisi.

“Tunjukkan wajah demokrasi yang humanis, cerdas, beretika, dan menjunjung tinggi hukum. Caranya adalah menunjukkan sikap yang menjunjung tinggi netralitas ASN, serta memberikan edukasi kepada publik cara-cara berdemokrasi yang baik, bukan malah menodainya” jelas Fikri.

Pada masa kampanye yang akan berakhir kurang satu bulan lagi, dirinya mengajak seluruh elemen untuk bersama menjaga suasana pendidikan yang kondusif demi masa depan generasi bangsa. “Janganlah dunia pendidikan dijadikan korban kampanye pemilu yang tak mengindahkan aturan dengan benar,” tandas legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu. (ts/rnm).



Evaluasi Perpunas, Komisi X Dukung Gerakan Literasi Membaca di Indonesia





Komisi X DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Plt. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Aminudin Aziz guna mengawasi sekaligus mengevaluasi kinerja Perpusnas sepanjang tahun 2023. Dalam rapat ini, Komisi X mendukung penggalakan gerakan literasi membaca di Indonesia.

“

**DENGAN
ANGGARAN
TERBATAS,
BERHARAP
PERPUSNAS
TIDAK PATAH
SEMANGAT
MEMBANGUN
BANGSA.**

Dr. DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, ST, M.I.Pol.
Wakil Ketua KOMISI X DPR RI
Fraksi Demokrat Dapil Jawa Barat II.
Foto: Ruslan

Hal ini jadi perhatian lantaran skor literasi membaca masih dinilai cukup jauh dari harapan. Dimana berdasarkan PISA 2022, Indonesia berada pada peringkat 10 terbawah dalam kategori literasi membaca. Disimpulkan, Indonesia kini menempati peringkat 70 dari 80 negara dengan skor literasi membaca sebesar 359.

Walaupun begitu, Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi tetap mengapresiasi kerja Perpusnas yang telah berupaya keras membuka sejumlah akses agar masyarakat di berbagai daerah bisa lebih mudah menjangkau untuk membaca. Dengan anggaran terbatas, ia berharap Perpusnas tidak patah semangat membangun bangsa.

Dirinya pun mengusulkan agar Perpusnas membangun kemitraan dengan berbagai stakeholder terkait. Usaha ini, sebutnya, akan membantu mengakselerasi peningkatan literasi membaca. "Kami, Komisi X, mengapresiasi kerja Perpusnas di tahun 2023. Supaya harapan kita bersama tercapai, Perpusnas perlu melakukan kerja sama kemitraan sehingga tidak bekerja sendiri karena didukung oleh mitra yang ada di pusat maupun di daerah,"

tutur Dede saat memimpin RDP bersama Perpusnas di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Mewakili Komisi X DPR, dirinya juga mengusulkan agar Perpusnas meninjau kembali Peraturan Perpusnas Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota terkait Persyaratan Pengadaan Lahan. Menurutnya, peraturan tersebut perlu dikaji secara komprehensif agar perpustakaan di daerah bisa memenuhi standar layanan dan sarana prasarana perpustakaan yang layak.

Terakhir, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga mendorong pihak pemerintah bersama dengan Perpusnas merevitalisasi gerakan literasi membaca. Baginya, langkah ini perlu diambil supaya gerakan literasi membaca pada tahun 2024, bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Menurut kami, gerakan literasi ini perlu direvitalisasi. Penguatan tata kelola lembaga, sinergi dan koordinasi, dan juga perluasan ruang lingkup secara holistik dan integratif perlu dibenahi dari hulu ke hilir. Revitalisasi tersebut diharapkan dapat menciptakan gerakan literasi yang masif dan berkesinambungan," tutup legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat II itu. (ts/aha)

Manfaatkan Dana Abadi Kebudayaan Bangun Jalur Rempah Indonesia

Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan agar antar elemen pemerintah bersama dengan lembaga masyarakat berkolaborasi membangun sekaligus menguatkan kebudayaan, termasuk jalur rempah yang dimiliki bangsa Indonesia. Memanfaatkan dana abadi kebudayaan, menurutnya, perlu diupayakan agar maksimal dalam implementasinya.

"Orang mengenal coklat itu Belgia, padahal coklatnya dari Sulawesi Barat. Kita termakan branding orang, bukan branding kita sendiri. Nah, Indonesia ini punya dana abadi kebudayaan. Nah, (membangun jalur rempah Indonesia) itu bisa dialokasikan dalam konteks besar. Jangan sporadis, justru harus besar dalam proses ini," tutur Ledia yang dikutip oleh Parlemenaria, Senin (8/1/2024).

Politisi Fraksi PKS itu berharap dana abadi kebudayaan tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ia tidak ingin harapan tersebut kandas akibat terkendala anggaran yang terbatas. Perlu diketahui,

“
KITA TERMAKAN
BRANDING
ORANG, BUKAN
BRANDING KITA
SENDIRI

Kemendikbudristek mengupayakan dana abadi kebudayaan (dana Indonesiana) tahun 2024 mencapai Rp7 triliun.

Rencananya, anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pengembangan dan kemajuan kebudayaan daerah di Indonesia. Maka, jika jalur rempah terwujud, ia memprediksi tidak hanya sektor pariwisata yang mengalami perubahan yang lebih baik, namun juga sektor pertanian, perdagangan, dan kesehatan.

Oleh karena itu, Ledia menegaskan kolaborasi harus menjadi semangat bersama. Melibatkan sejumlah kementerian, ia ingin mengakselerasi upaya-upaya supaya jalur rempah yang dimiliki Indonesia bisa hidup kembali.

"Bicara jalur rempah itu harus melibatkan kementerian kesehatan, perdagangan dan pertanian. Supaya ini ditingkatkan kualitas



Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T.
Anggota KOMISI X DPR RI, Fraksi PKS Dapil Jawa Barat I.
Foto: Ruslan

dibuatkan ekspor. Dihidupkan kembali, ya. Orang Indonesia luar biasa. Kita punya cengkeh pala, dan kemiri di mana tempat lain gak ada. Itu yang harusnya bisa dikuatkan," ujarnya.

Menutup pernyataan, dirinya berharap bangsa Indonesia menjadi tuan atas kekayaan negara yang dimiliki termasuk pariwisata. Potensi alam yang berlimpah, nilainya, harus kerap dilestarikan dan diwariskan pada generasi muda bangsa.

"Kita ini ibarat orang kaya yang tidak tau kalau kaya. Justru harus kita gali. Kita sampaikan ke masyarakat agar bagaimana kekayaan kita bisa tidak habis. Orang bilang pengen kaya tujuh turunan, kita ini bisa terus kaya berturun-turun," tandas legislator Jawa Barat I itu. (ts/rnm)

Wakil Ketua Komisi X DPR meluncurkan buku "Darurat Literasi Indonesia"

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih (tengah) pada peluncuran buku berjudul "Darurat Literasi Indonesia: Urgensi Reformulasi Sinergi dan Kolaborasi" di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, pada Selasa (19/3/2024). (ANTARA/ Lintang Budiyantri Prameswari) Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meluncurkan buku berjudul "Darurat Literasi Indonesia: Urgensi Reformulasi Sinergi dan Kolaborasi" di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sebagai respons untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat.

"Titik tekannya di literasi, maka judulnya 'Darurat Literasi', ada urgensi sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan tingkat literasi kita, yang berdasarkan PISA (program penilaian pelajar internasional) itu nomor 74 dari 79 negara," katanya saat ditemui usai



peluncuran buku di Perpusnas, Jakarta, pada Selasa.

"Kalau bisa nanti setiap panja (panitia kerja) menerbitkan buku, jadi publik tidak perlu susah-susah mengakses dan mencari-cari apa sih yang dihasilkan DPR, dan selanjutnya kalau bisa dalam bentuk jurnal, agar dapat disitasi untuk membuat kajian, riset, dan seterusnya," ujar dia.

Ia menegaskan, meski buku tersebut belum memenuhi standar-standar ilmiah dari segi akademik, tetapi diharapkan dapat memantik keprihatinan masyarakat terhadap darurat literasi yang terjadi di Indonesia.

"Kita sudah sukses di pemberantasan buta huruf, tetapi berdasarkan PISA atau penilaian di tingkat internasional tadi, literasi itu tidak hanya membaca saja, tetapi bagaimana memahami konteks bacaan, kemudian digunakan untuk

**“
SALAH SATU
PERMASALAHAN
DI INDONESIA
SAAT INI YAKNI
DEFINISI LITERASI
YANG BERBEDA-
BEDA DITENGAH
MASYARAKAT**

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM
Wakil Ketua KOMISI X DPR RI Fraksi PKS
Dapil Jateng IX. Foto: Ruslan

memproduksi sesuatu, jadi buku ini diluncurkan supaya masyarakat ikut prihatin," tuturnya.

Ia juga menyebutkan, salah satu permasalahan di Indonesia saat ini yakni definisi literasi yang berbeda-beda di tengah masyarakat, sehingga perlu ada kesepakatan atau pembahasan khusus tentang satu definisi literasi yang jelas.

"Terdapat enam kementerian/lembaga yang mengampu program literasi dengan definisi literasi sendiri, ke depan ini mesti ada sinergi," ucapnya.

Adapun buku "Darurat Literasi Indonesia" ini terdiri dari 90 halaman yang memuat berbagai pembahasan, diantaranya perbandingan literasi Indonesia dengan negara lain, kebijakan anggaran literasi yang tersebar di kementerian/lembaga, kondisi tenaga perpustakaan di Indonesia, membangun kegemaran membaca melalui mendongeng, dan lain sebagainya.

Nantinya, Perpusnas akan menjadikan buku ini sebagai salah satu literatur nasional yang akan diseminasi ke seluruh perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, desa, hingga taman bacaan masyarakat, baik melalui digital maupun cetak. **(Antara)**

Dukung Pelestarian Budaya, Barang Non-Cagar Budaya Dinilai Berpotensi Jadi PNBP

Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah menyampaikan agar barang non-cagar budaya dimanfaatkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini patut dipertimbangkan untuk meningkatkan pemasukan negara.

"Kalau kita lihat empat pilar pemajuan kebudayaan, salah satunya kan pemanfaatan. Apabila cagar budaya bicara identitas bangsa, kalau di luar itu (non-cagar budaya) yang menarik ya untuk ekonomi, misalnya memberi pengalaman bagi wisatawan untuk merasakan apa yang hanya ada di Indonesia," ungkap Ferdiansyah dikutip oleh Parlemen, Selasa (9/1/2024).

Jika barang-barang bersejarah ditetapkan sebagai barang non-cagar budaya oleh pihak berwenang, menurut Ferdiansyah, benda-benda tersebut dinilai bisa dimanfaatkan untuk agenda edukasi melalui pameran yang bisa disaksikan secara langsung oleh wisatawan. Walaupun begitu, ia menegaskan implementasinya harus diatur oleh peraturan

perundangan.

Guna mewujudkan upaya tersebut, Politisi Fraksi Partai Golkar itu mendukung revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010. Ia juga mengusulkan supaya hasil PNBP dari barang non-cagar budaya bisa dikapitalisasi secara tepat guna dan tepat sasaran sehingga bisa menguntungkan untuk pelestarian budaya setempat.

"Riset tentang kebudayaan kan juga perlu fasilitasi yang lebih baik dan untuk melakukannya kita butuh biaya yang tidak murah. Arkeolog juga perlu mendapatkan sertifikasi cagar budaya, sebagaimana cita-cita bangsa untuk menjaga budaya dalam haluan pembangunan nasional," terangnya.

Tidak hanya itu, Ferdiansyah mendorong agar program-program pendidikan dan penelitian yang

berkelanjutan maksimal diberdayakan. Elemen ini menjadi krusial dalam pelestarian cagar budaya. Ia melihat cagar budaya memiliki potensi menciptakan keseimbangan lingkungan sekaligus pembangunan berkarakter yang berkelanjutan.

"Beberapa kawasan cagar budaya mencakup kawasan alam yang berharga dan memiliki ekosistem yang sensitif. Melalui perlindungan cagar budaya, kelestarian lingkungan alam juga dipertahankan, memastikan bahwa warisan budaya dan keanekaragaman alam dapat dinikmati oleh generasi mendatang," pungkas Legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat XI itu. (ts)

“
**RISET TENTANG
KEBUDAYAAN
KAN JUGA PERLU
FASILITASI YANG
LEBIH BAIK**

FERDIANSYAH, S.E., M.M
Anggota KOMISI X DPR RI
Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Barat XI
Foto: Ruslan



Pemerintah Harus Benahi Sistem Pendidikan Imbas Turunnya Skor Indonesia di Survei PISA 2022

Anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal menanggapi laporan adanya penurunan skor pada Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2022. Atas dasar laporan itu, dirinya menegaskan pemerintah perlu melakukan pembenahan sistem pendidikan Indonesia secara menyeluruh.

Secara Internasional, skor literasi membaca Indonesia mengalami penurunan hingga 12 poin. Kemudian, skor matematika Indonesia turun hingga 13 poin. Selain itu, skor sains mengalami sedikit penurunan hingga di atas rata-rata dari 13 poin.

“Skor yang turun ini tentu menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua agar kedepannya dapat meningkatkan kualitas kemampuan siswa dalam literasi, terutama dalam matematika dan sains siswa,” tanggap Mustafa melalui rilis yang disampaikan kepada Parlemen, di Jakarta, pada Sabtu (30/12/2023).

Menurut Mustafa, penurunan skor ini juga disebabkan oleh Pandemi Covid-19, sehingga memberikan dampak besar terhadap kualitas literasi siswa

“**SECARA INTERNASIONAL, SKOR LITERASI MEMBACA INDONESIA MENGALAMI PENURUNAN HINGGA 12 POIN**”

H. MUSTAFA KAMAL, S.S
Anggota KOMISI X DPR RI
Fraksi PKS Dapil Sumatra Selatan I
Foto: Ruslan



Indonesia.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKS itu berharap pemerintah lebih tanggap untuk menyelesaikan isu tersebut dengan solusi yang efektif. Apalagi, menurutnya, penurunan skor ini juga disebabkan oleh Pandemi Covid-19, sehingga memberikan dampak besar terhadap kualitas literasi siswa Indonesia.

“Menurut saya, guru harus mampu menghadirkan kontekstual masalah dalam kehidupan sehari-hari yang nantinya dicurahkan dalam bentuk soal. Namun, guru dan pemerintah tentu sudah berusaha dalam meningkatkan kualitas pendidikan siswa di Indonesia.” tandasnya.

Sebagai informasi, Survey Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2022

ini mengukur kualitas literasi, matematika, dan sains siswa yang terlibat dalam survei di negara OECD, termasuk di dalamnya Indonesia. Kegiatan ini melibatkan kurang lebih 14.000 siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP), kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). (ts/rdn)

Pembangunan Literasi, Legislator Imbau Perpustnas Monitor Pemanfaatan Perpustakaan Per Hari

Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes mengimbau Plt. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpustnas RI) Prof. E. Aminudin Aziz dan jajaran wajib memonitor peningkatan kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat per hari. Fahmi memandang, gedung-gedung perpustakaan dengan segala macam kelengkapannya yang dibiayai oleh negara harus berujung pada pemanfaatan dalam upaya pembangunan literasi.

Hal itu disampaikan Fahmi saat rapat kerja

dengan Plt. Kepala Perpustnas RI Prof. E. Aminudin Aziz dengan agenda realisasi program dan anggaran sampai akhir Desember 2023, tindak lanjut laporan Panja peningkatan literasi dan tenaga perpustakaan, penyampaian DIPA TA 2024 sesuai amanat RDP 15 November 2023 sebagai bahan persiapan pengawasan dalam pelaksanaan APBN 2024.

“Padahal masalah kemajuan atau pembangunan literasi ini sudah berumur

cukup panjang bahkan 70 tahun lebih ketika dulu Presiden Soekarno pertama kali dengan gerakan pemberantasan buta huruf, kita sudah 78 tahun merdeka. Artinya harus terus menerus diupayakan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah gerakan semesta,” ujar Fahmi di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut lebih lanjut menegaskan seluruh pemangku kebijakan harus meningkatkan kolaborasi, koordinasi dan sinergi. Sehingga, tandas Legislator Dapil Jawa Barat V ini, Indonesia dari tahun ke tahun benar-benar terjadi upaya pengembangan literasi.

“Sehingga angkanya tidak kecil seperti yang saya gambarkan, ditempat kami hanya 7.000 penduduk yang memanfaatkan perpustakaan, rata-ratanya seperti itu. Tapi itulah pandangan saya, PR kita dalam konteks kita pembangunan literasi masih luar biasa banyak,” pungkas Fahmi. (pun/aha)

“
**PEMANGKU
KEBIJAKAN
HARUS
MENINGKATKAN
KOLABORASI,
KOORDINASI
DAN SINERGI**”

Dr. FAHMI ALAYDROES, M.M., M.Ed
Anggota KOMISI X DPR RI
Fraksi PKS Dapil Jabar V.
Foto: Rustan



Kawal Honorer Jadi PPPK, Komisi X: Guru Menentukan Nasib Masa Depan Bangsa

Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menilai rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) perlu ditangani oleh pemerintah pusat sepenuhnya, mulai dari pendaftaran hingga penempatan. Menurutnya, upaya ini berpotensi menekan adanya isu kecurangan sekaligus memberikan kepastian status bagi para honorer yang dinyatakan lulus PPPK.

Pasalnya, berdasarkan laporan yang ia terima, rekrutmen PPPK di tingkat daerah seringkali dihadapi oleh sejumlah kendala. Di antaranya, adanya pungli dalam tahapan rekrutmen dan keterbatasan anggaran daerah sehingga banyak guru honorer yang sudah lulus passing grade (PG) namun belum mendapatkan formasi sehingga terkatung-katung. Diketahui, ada 12.276 guru honorer yang lulus P1 belum terakomodir penempatan sampai saat ini.

"Problemnya, banyak honorer yang sudah lama mengabdikan belum masuk data dapodik, di sini jadi celah pungli. Ini kan masalah-masalah ini jadi makin menumpuk. Jika masalah anggaran, Komisi X bersama

Kemendikbudristek dan Kemenkeu telah sepakat menganggarkan 19-21 triliun per tahun untuk membayar guru PPPK," ungkap Purnamasidi kepada Parlemen di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR dengan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPGSI) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menekankan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saling bersinergi agar peraturan-peraturan serta implementasinya bisa berjalan selaras. Hal ini krusial guna menekan adanya misinterpretasi dan kesalahan implementasi.

Tidak hanya itu, Purnamasidi mengusulkan supaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi leading sector untuk rekrutmen PPPK guru. Harapannya, upaya ini akan memotong panjangnya rantai birokrasi rekrutmen tersebut.



H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI Anggota KOMISI X DPR RI Fraksi Golkar Dapil Jatim IV. Foto: Ruslan

"Profesi guru yang ini menentukan nasib masa depan bangsa kita. Sudah, yang berkaitan dengan urusan profesi guru, kita tarik ke pusat saja. Biar negara yang mengurus guru agar standarisasi kesejahteraan guru terpenuhi," lugasnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi menekankan agar guru honorer yang belum terakomodir menjadi PPPK agar tidak berputus asa. Ia berharap rekrutmen CASN 2024 yang dibuka pemerintah sebanyak 2,4 juta formasi juga memberi ruang bagi guru honorer dan tenaga pendidik.

"Artinya, peluang untuk masuk (sudah) ada. Tinggal, meyakinkan pemerintah daerah. Jawa Timur ini bisa menjadi 'best practice' karena mampu menyerap PPPK guru menyeluruh. Ini akan kami sampaikan kepada Kemendikbudristek agar bisa menjadi masukan," tandas wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar II ini. (ts/aha)

Pengembangan Destinasi Wisata di Kota Pasuruan Penting Miliki Cagar Budaya yang Dilestarikan

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji mengingatkan bahwa dalam rangka untuk mengembangkan destinasi wisata maka penting untuk diperhatikan untuk memiliki cagar budaya yang dilestarikan. Hal itu disampaikannya saat melihat sepanjang jalan di Kota Pasuruan terdapat banyak bangunan yang betul-betul masih asli, belum ada pemugaran.

"Tidak seperti di kota-kota lain mungkin banyak yang dirombak dengan arsitektur yang lebih modern seperti zaman sekarang, namun di Pasuruan tidak. Semua masih asli dalam bentuk bangunan lama, seharusnya hal seperti ini bisa menjadi modal bangunan-bangunan yang bisa menjadi cagar budaya," ungkapnya kepada Parlementaria usai melakukan kunjungan Ke Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Rabu (6/12/2023).

Lanjut Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan, di Kota Pasuruan masih banyak sekolah-sekolah

dengan bangunan lama, adapula bangunan bersejarah lainnya. Dengan demikian sudah seharusnya bangunan-bangunan yang ada saat ini oleh Pemerintah setempat agar bisa termasuk dalam cagar budaya. Lalu, setelah itu, dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata.

"Kalau menurut saya, yang harus diperhatikan jika mau

mengembangkan (wisata) Heritage sebagai modal pariwisata di Pasuruan (yaitu agar)

Ir. H. NUROJI
Anggota KOMISI X DPR RI
Fraksi Partai Gerindra
Dapil Jawa Barat VI.
Foto: Ruslan



“

**TANJUNG
TEMBIKAR DI
PASURUAN
MEMILIKI NILAI
SEJARAH YANG
TINGGI. BAHKAN,
DIYAKINI, USIA
PELABUHAN
TERSEBUT LEBIH
TUA
DIBANDINGKAN
TANJUNG PERAK
YANG ADA DI
SURABAYA.
NAMUN,
DIBUTUHKAN
ANGGARAN DARI
PEMERINTAH
UNTUK DAPAT
DIKEMBANGKAN
KEMBALI SEBAGAI
WISATA CAGAR
BUDAYA.**

semua bangunan-bangunan harus dicagar budayakan. Itu sangat penting. Hal lain yang juga harus diperhatikan harus siap dengan sarana dan prasarana misalkan terbuka untuk umum, tersedia pilihan kuliner, lalu disiapkan fasilitas lainnya seperti, parkir kemudian toilet yang juga harus



Menara air peninggalan pemerintah kolonial Belanda di kawasan Alun-alun Kota Pasuruan.

memadai sehingga orang datang bisa puas,” jelasnya

Dalam pertemuan itu pula, sebagaimana disampaikan Wali Kota Pasuruan Syaifullah Yusuf, bahwa di kota tersebut terdapat sejarah peninggalan nusantara yang lebih tua daripada Tanjung Perak di Surabaya. Namanya, Tanjung Tembikar di Pasuruan. Menurut Nuroji, hal itu sangat menarik buat dipelajari sebagai minat wisata sejarah untuk dipahami lagi, dan juga dilengkapi dengan referensi-referensi sejarah di perpustakaan.

“Dengan demikian perlu adanya pengembangan terkait wisata bersejarah lainnya di Pasuruan harus ada story telling-nya. Saya rasa itu potensi lainnya. Kalau untuk

yang Heritage masih lengkap kalau saya lihat dari beberapa bangunan bahkan cukup banyak yang bisa menceritakan sejarahnya Pasuruan,” jelasnya.

Dalam hal anggaran, Nuroji menilai perlu ada penambahan guna mengembangkan destinasi wisata. Setidaknya, menurutnya, dengan adanya kunjungan Komisi X ke Pasuruan dapat melihat ada potensi besar dan kemauan besar pemerintah Pasuruan.

“Untuk itu perlu adanya dorongan nanti di pusat melalui rapat-rapat dengan pihak terkait untuk diusahakan agar Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) agar bisa lebih ditingkatkan,” jelasnya. (rni/rdn)

Kehadiran Pesantren di Tiap Desa di Kota Pasuruan Perkuat Tingkat Pendidikan yang Lebih Berakhlak

Anggota Komisi X DPR RI Haerul Amri mengatakan bahwa Kota Pasuruan terkenal dengan julukan Kota santri. Hal itu ditunjukkan bahwa di tiap desa terdapat pesantren. Sehingga, menurutnya hal ini menjadi yang sangat baik guna menunjang tingkat pendidikan yang lebih religius dan berakhlak melalui metode pendidikan berbasis agama yang dikedepankan.

"Dengan hadirnya pesantren pada zaman sekarang yang sangat dibutuhkan, saya kira para siswa dan siswi bukan hanya untuk mendapatkan persoalan kecerdasan akan tetapi juga membangun

karakter akhlakul karimah, tata karma, sopan santun yang baik. Apalagi ke depan tantangan kehidupan kita kan semakin kompleks, semakin besar khususnya persoalan sosial," demikian diungkapnya kepada Parlementaria usai melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Rabu

“

**AKHLAK MULIA
MENCAKUP ETIKA,
BUDI PEKERTI,
ATAU MORAL
SEBAGAI
PERWUJUDAN
DARI PENDIDIKAN**

MOH. HAERUL AMRI, SP.
Anggota KOMISI X DPR RI Fraksi Partai NasDem
Dapil JAWA TIMUR II. Foto: Ruslan

(06/07/2023).

Lanjut Politisi Fraksi Partai NasDem itu menjelaskan, ciri khas wilayah Kota Pasuruan menjadikan dunia pendidikan betul-betul dilandaskan oleh nilai-nilai keagamaan yang sangat matang. Karena itu, dengan bekal pendidikan agama bagi siswa dan siswi tersebut, ia harap mampu menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, taqwa, dan berakhlak mulia.

"Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari Pendidikan," jelas Haerul.

Di sisi lain, Kota Pasuruan tengah

mengedepankan wisata religi yang langsung diinisiasi oleh Walikota Pasuruan Saifullah Yusuf yang akrab dipanggil Gus Ipul, di Kota Madinah. Di mana terdapat Makam Mbah Hamid yang sudah banyak masyarakat berkunjung untuk berziarah terutama di hari-





PONDOK PESANTREN SIDOGIRI (MIFTAHUL ULUM) PASURUAN

Merupakan salah satu Pondok Pesantren terkenal di Nusantara. Bahkan luar negeri sekalipun. Para santrinya tak hanya berasal dari Jawa Timur saja, bahkan hampir seluruh belahan tanah Indonesia hingga beberapa negara selain Indonesia. Pesantren ini berdiri pada tahun 1745 M atau 1158 H oleh Mbah Sayyid Sulaiman (merupakan cucu Sunan Gunung Jati Cirebon).

hari tertentu, namun dari segi fasilitas belum memadai. Untuk itu, Pemerintah Kota Pasuruan membuat terobosan dengan adanya pembangunan revitalisasi di sekitar alun-alun menjadi seperti di Kota Madinah.

“Jika di (Saudi) sana ada Makam Rasulullah dan Masjid Nabawi suasana depan yang luas dengan sejumlah payung teduh dihadirkan, untuk itu Pasuruan mencontoh dan mengembangkan pembangunan 12 payung

teduh yang hari ini sudah berdiri di seputaran Masjid Masjid Al-Anwar,” tambah Gus Ipul.

Karena itu, menurut Haerul adanya wisata religi akan menjadi episentrum wisata yang sangat bagus sekali yang akan dilakukan pemerinta Kota Pasuruan. “Untuk menarik minat masyarakat seluruh nusantara tidak hanya setempat dapat berkunjung ke wisata religi,” pungkas Politisi Dapil Jawa Timur II.

Dengan hadirnya wisata religi maka akan ada pertumbuhan ekonomi yang baik. Termasuk juga ada sejumlah manfaat yang bisa didapatkan dengan berwisata religi yang pastinya akan meningkatkan nilai keimanan, dengan banyak orang berwisata menambah persaudaraan dari lintas daerah. kemudian pastinya karena orang semakin banyak yang datang, ada peningkatan penghasilan yang ada di daerah. (rni/rdn)

Guru Swasta yang Lulus PPPK Diharapkan Dapat Kembali ke Sekolah Asalnya

Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati mengungkapkan dalam kunjungan kerja reses kali ini, pihaknya mendapati kekhawatiran seputar guru sekolah swasta yang lulus tes guru PPPK. Dimana pihak sekolah swasta khawatir guru yang lulus PPPK tidak dapat kembali mengajar ke sekolah semula.

"Ada permasalahan soal guru PPPK, yang dari guru swasta diharapkan bisa dikembalikan ke tempatnya kembali. Kalau sekarang tidak bisa kembali. Ini masalah bagi guru dan sekolah swasta," ujarnya usai menyerap masukan dari

pertemuan dengan Pemerintah Kota Padang Panjang dan pihak terkait lainnya di Kantor Walikota Padang Panjang, Sumatera Barat, Rabu (6/12/2023).

Adapun permasalahan ini mengemuka saat Dewi dan tim Komisi X mendengarkan masukan dan keluhan para guru di Padang Panjang.

**“
KALAU
SEKARANG
TIDAK BISA
KEMBALI.
INI
MASALAH
BAGI GURU
DAN
SEKOLAH
SWASTA**

drh. Hj. DEWI CORYATI, M.Si
Anggota KOMISI X DPR RI Fraksi PAN
Dapil Bengkulu. Foto: Ruslan

Problem ini tentu menuai kedaruratan sumber tenaga pengajar di sekolah swasta, lantaran cukup banyak para gurunya yang melamar jabatan PPPK.

Selain persoalan guru, Dewi dan Komisi X juga mendapatkan masukan terkait implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, sebuah program bantuan bagi lulusan SMA sederajat untuk meneruskan pendidikan ke bangku perkuliahan. Meski anggarannya bertambah, namun tidak dengan peserta penerima bantuan.

"Soal KIP kuliah ini memang anggarannya bertambah tapi volumenya tetap, karena belanjanya diperbesar. Nah ini jadi masukan berarti bagi kami, bahwa KIP kuliah sangat diperlukan untuk mencerdaskan generasi muda ke perguruan tinggi," ungkapnya.

Lebih lanjut ia menyebutkan masukan dan keluhan itu akan jadi bahan perbincangan Komisi X dengan pemerintah. "Bahwa fakta ini benar adanya dan kami juga temukan di Padang Panjang ini," sebutnya. (aha)



Penyelesaian Guru Honorer Tak Kunjung Tuntas, Komisi X DPR Desak Bentuk Pansus

Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mudjahid mendorong realisasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk percepatan penyelesaian guru honorer yang terkesan telah berlarut-larut permasalahannya. Hal itu ia kemukakan Sodik di sela-sela Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Aceh, baru-baru ini. "Kementerian PANRB, Bappenas, Menteri Keuangan dan beberapa kementerian yang banyak tenaga honorernya seperti Kemendikbud, Kemenkes, Kementerian Pertanian pada tahun 2023 harus duduk bersama, sehingga persoalan pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) cepat selesai. Oleh karena banyak daerah yang belum mampu membiayai PPPK tersebut," kata dia dikutip dari laman DPR RI, Selasa (20/12/2022). Sodik menilai masalah guru honorer selalu menjadi hambatan karena pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sementara, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya terbatas karena terdampak adanya

pandemi Covid-19. Baca juga: [POPULER MONEY] Ada KKN dalam Rekrutmen Tenaga Honorer | KKP Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Dijual Apalagi pemerintah melalui Kementerian PANRB meminta seluruh pemerintah daerah menghapus tenaga honorer pada November 2023. Kebijakan ini untuk menata

**“
KALAU
SEKARANG
TIDAK BISA
KEMBALI.
INI
MASALAH
BAGI GURU
DAN
SEKOLAH
SWASTA**

Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M. Sc.
Anggota KOMISI X DPR RI
Fraksi Partai Gerindra
Dapil Jawa Barat I.
Foto: Rustan

sistem kepegawaian. Bagi daerah yang membutuhkan tenaga tambahan bisa menggunakan tenaga kerja dengan status outsourcing (alih daya). Politisi dari Partai Gerindra ini juga menyoroti beberapa masukan dari para guru di Aceh baik yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai honorer yang sedang proses menjadi PPPK. "Di SMPN 6 Aceh tadi saya mendengar keluhan guru negeri. Ia asalnya adalah guru swasta yang diangkat menjadi pegawai negeri dan harus melepaskan sekolah lamanya. Ini adalah masalah lama dan kita sudah mendengar sebelumnya tapi kunjungan kali ini membuktikan bahwa hal semacam ini benar terjadi di lapangan," ucapnya





MEMBANGUN PARIWISATA PASCA-PANDEMI

Pasca Pandemi Covid-19, dunia pariwisata mulai menggeliat kembali. Namun, berbeda dengan keadaan sebelumnya, perilaku wisatawan mempengaruhi kecenderungan mereka untuk berdharmawisata. Perubahan ini wajib diantisipasi oleh para pelaku wisata, sehingga tidak tertinggal dalam mengejar ketertinggalannya. Selain mengantisipasi perubahan trend wisata, pemerintah dan pelaku wisata, perlu belajar dari negara lain dan mengantisipasi kondisi ekonomi global dalam membangun kembali dunia pariwisatanya.



Sebelum pandemi Covid-19, United Nations World Tourism Organization (UNWTO) memprediksi bahwa wisatawan internasional akan mencapai 1,8 miliar pada tahun 2030 dengan tingkat pertumbuhan kunjungan 3,3% per tahun. Wilayah Asia-Pasifik diperkirakan tumbuh lebih tinggi yaitu 4,9%. Namun, pasca Covid-19, UNWTO justru melaporkan bahwa pemulihan pariwisata Asia Pasifik tertinggal dibanding wilayah lain. Pada September 2022, pemulihan pariwisata Eropa mendekati angka sebelum pandemi, yakni 74%, Amerika 65% dan Timur Tengah 76%. Sedangkan pemulihan pariwisata di Asia-Pasifik hanya sebesar 14%. Pada kondisi ini, UNWTO

mengingat bahwa kerjasama pariwisata sangat dibutuhkan, mengingat kebijakan restriksi di berbagai negara akibat pengendalian penyebaran virus Covid-19 menyebabkan kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) menurun tajam. Di Indonesia, jumlah kunjungan Wisman dari 16,1 juta (2019) menjadi 4,0 juta (2020). Pada tahun 2021 hanya mencapai 1,5 juta kunjungan, atau turun sebesar 61,6% dibandingkan kunjungan tahun 2020. Baru pada tahun 2022, jumlah kunjungan Wisman maupun Wisnus (wisatawan nusantara) berhasil melampaui target.

Kemenparekraf/Baparekraf RI mencatat, tahun 2022, terdapat kunjungan Wisman sebanyak 5,5 juta, di atas target yang sejumlah 1,8-3,6 juta kedatangan, sedangkan pergerakan Wisnus mencapai 800 juta perjalanan atau di atas target yang sebesar 550 juta perjalanan. Kondisi kepariwisataan di Indonesia pasca pandemi makin menguat meski belum mencapai level pra-pandemi. Kemenparekraf/Baparekraf RI memprediksi kunjungan Wisman hingga akhir tahun 2023 bisa menembus kurang lebih sebanyak 9 juta kunjungan.

Mengingat ada perbedaan perilaku masyarakat pasca pandemi, pemerintah dan pelaku wisata perlu mengantisipasi trend perubahan perilaku wisatawan. Berbagai langkah strategis, inovatif, adaptif, dan kolaboratif perlu dilakukan untuk mencapai target pariwisata, termasuk memberikan kemudahan bagi pelaku pariwisata dalam mengembangkan usaha. Data Trendburo menggambarkan beberapa perubahan perilaku masyarakat pasca-pandemi, seperti kecenderungan untuk tak lagi memiliki motivasi dalam mencapai hal-hal besar; selalu meragukan diri sehingga sulit untuk memilih destinasi yang tepat; menghindarkan diri dari kenyataan yang dialami selama pandemi; dan gaya hidup polisentris atau kecenderungan “nomad” dan

lebih sering melakukan perjalanan. Perubahan perilaku wisatawan ke depan akan lebih personal, customize, localize, dan smaller in size.

Personalize artinya wisatawan akan lebih cenderung mencari pengalaman yang disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan pribadi mereka. Akan ada peningkatan permintaan untuk pengalaman wisata yang dapat diubah dan disesuaikan sesuai dengan selera individu. Customize, diartikan bahwa wisatawan akan mencari pengalaman yang dapat diubah atau disesuaikan sesuai dengan preferensi mereka. Mencakup pilihan yang lebih besar dalam hal aktivitas, akomodasi, dan rute perjalanan yang dapat dipilih oleh wisatawan sesuai dengan keinginan mereka. Localize artinya wisatawan akan lebih tertarik untuk mengenal dan merasakan kehidupan lokal serta budaya di destinasi yang mereka kunjungi. Akan ada peningkatan minat terhadap pengalaman lokal, makanan lokal, dan interaksi



dengan komunitas setempat. Dan Smaller in Size diartikan sebagai ada kecenderungan menuju kelompok perjalanan yang lebih kecil. Akan terjadi penurunan minat terhadap perjalanan massal, dengan preferensi untuk kelompok perjalanan yang lebih kecil dan lebih intim.

Menghadapi trend perubahan perilaku wisatawan tersebut, pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata serta pelaku wisata dapat mengambil beberapa langkah seperti: pertama, fokus pada pengembangan pengalaman wisata yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan serta preferensi wisatawan. Hal ini bisa dilakukan dengan menawarkan paket wisata yang dapat disesuaikan, aktivitas yang berbeda-beda, dan aksesibilitas yang mudah. Kedua, memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk memberikan pengalaman wisata yang personal dan custom. Misalnya, aplikasi mobile yang memungkinkan wisatawan merencanakan perjalanan mereka sendiri, memesan penginapan yang sesuai dengan preferensi mereka, atau menemukan aktivitas lokal yang unik.

Ketiga, fokus pada promosi destinasi lokal yang lebih kecil dan kurang diketahui, serta memberdayakan komunitas lokal untuk mengembangkan dan memasarkan produk dan pengalaman wisata mereka sendiri.

Ini akan membantu mengurangi tekanan wisata massa di

destinasi populer dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih langsung kepada masyarakat lokal. Keempat, melakukan pengembangan produk wisata yang berkelanjutan, mengutamakan kelestarian lingkungan, budaya, dan sosial. Ini akan membantu menarik minat wisatawan yang semakin peduli dengan isu-isu keberlanjutan dan bertanggung jawab.

Kelima, fokus pada peningkatan kualitas layanan, termasuk akomodasi, transportasi, dan pelayanan wisata lainnya, untuk memastikan bahwa pengalaman wisatawan tetap memuaskan dan memikat. Keenam, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam menghadapi perubahan perilaku wisatawan. Kolaborasi ini dapat mencakup pengembangan infrastruktur pariwisata, pelatihan SDM, promosi destinasi, dan pengelolaan keberlanjutan.

Setelah hanya berfokus pada penggiatan program “di Indonesia aja” (Bangga Berwisata di Indonesia), pada 2023 terdapat 137 event yang dilangsungkan: sebanyak 37 sport tourism event, 49 event MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition), 38 music and creative event, dan 13 special interest event. RPJMN 2020 - 2024 menetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas sebagai Bali Baru. Dari 10 destinasi Bali Baru tersebut, pemerintah menetapkan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yaitu Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo. Pembangunan infrastruktur DPSP diprediksi tuntas pada triwulan III 2024 yang berfokus pada pengembangan jalan pendukung, pelabuhan dan bandara, perintisan

destinasi pariwisata, pembangunan desa wisata, pembangunan amenitas kawasan wisata, serta pembangunan dalam wilayah dan kawasan. Termasuk juga pengembangan produk wisata, perbaikan ekosistem ekonomi kreatif, hingga persiapan

sumberdaya manusia (SDM).

Mencapai target-target 2024 tersebut, sebagaimana saran UNWTO, penanganan kepariwisataan perlu belajar dari strategi di berbagai negara. Belajar dari upaya negara-negara lain dalam memperbaiki kinerja pariwisata dapat memberikan sejumlah manfaat. Beberapa alasan perlunya kerjasama dan belajar dari pengalaman negara lain, adalah agar (1) dapat mengidentifikasi praktik dan strategi efektif dalam mengelola sektor pariwisata; (2) mengidentifikasi cara mengoptimalkan potensi pariwisata lokal; (3) memahami keberhasilan dan kegagalan negara lain, sehingga merangsang inovasi dan diversifikasi industri pariwisata; (4) meningkatkan daya saing di pasar global; (5) saling belajar dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan dan manajemen bencana dalam pengembangan pariwisata; dan (6) meningkatkan kualitas layanan pariwisata, mencakup SDM, teknologi, dan fasilitas wisata. Perlu diperhatikan bahwa kecepatan dalam memulihkan pariwisata di tiap kawasan, dapat berbeda-beda. Kawasan Timur Tengah sudah pulih lebih cepat ditopang oleh kenaikan harga minyak bumi. Namun, adanya imbas dari perang di Gaza dan sekitarnya, dimungkinkan wisata di kawasan tersebut akan terkendala. Sementara kawasan Eropa Barat masih harus bersabar menunggu tahun 2025 akibat dampak perang di Ukraina.

Optimisme pertumbuhan pariwisata dunia yang segera pulih masih menyimpan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Turbulensi ekonomi dimungkinkan masih akan terjadi. Faktor utamanya bukan lagi karena pandemi, melainkan adanya ancaman resesi karena meningkatnya inflasi di banyak negara. Ditambah lagi rantai pasok perdagangan yang terganggu akibat perang yang berpotensi menyebabkan krisis pangan dan energi.

Dr. Masad Masrur
(Tenaga Ahli Komisi X)

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPRRI Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 Ke Kabupaten Pekalongan 29 - 31 Januari 2024

Komisi X DPR RI melaksanakan Kunker Spesifik pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 ke Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pada tanggal 29-31 Januari 2024. Kunjungan dipimpin oleh Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi X DPR RI dari berbagai Fraksi.

Kunker Spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Pekalongan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif. Tim kunjungan kerja terdiri dari perwakilan masing-masing fraksi, dan juga di dampingi oleh pejabat dari Kemenparekrat/Baparekraf.

Kunjungan diterima langsung oleh Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, SE., MM. dalam pertemuan di pendopo Pemda Kabupaten Pekalongan. Dalam pertemuan hadir para kepala dinas terkait, perwakilan perguruan tinggi, pelaku ekraf dan para pemangku kepentingan ekraf lainnya.

Beberapa aspirasi dan masukan yang disampaikan para pemangku kepentingan, antara lain agar batik atau membatik dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, khususnya bagi daerah yang memiliki keunggulan dalam hal batik. Aspirasi lainnya, subsektor ekraf perfilman minim SDM, sehingga kesulitan dalam merekrut SDM film ketika membuat film, dimana Kabupaten Pekalongan juga mengembangkan film-film pendek. Selain terdapat beberapa permasalahan yang disampaikan secara tertulis.

Secara umum Komisi X mengapresiasi Pemda Kabupaten Pekalongan yang mulai fokus untuk mengembangkan ekraf dan telah mengeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekraf. Bahkan Haryanto, SS., MM. selaku Deputy Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf menyarankan agar Kabupaten Pekalongan mendaftarkan diri untuk mengikuti program KaTa (Kabupaten/Kota) kreatif. Hal ini karena persyaratannya sudah terpenuhi.

Kab. Pekalongan, 31 Januari 2024

Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Pekalongan





Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI Tentang Ekonomi Kreatif 29-31 Januari 2024

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI Tentang Ekonomi Kreatif 29-31 Januari 2024 yang di pimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ibu Agustina Wilujeng Premastuti diterima langsung oleh Bupati Boyolali, DPRD, beserta jajarannya dan para pemangku kepentingan bidang ekonomi kreatif.

Pemerintah Kabupaten Boyolali sudah memberikan fasilitas layanan kepada para pelaku UMKM untuk pendataan para pelaku UMKM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan ESEMU (Elektronik System UMKM).

Akademisi, peneliti, dan perguruan tinggi memiliki peran dalam pengembangan ekonomi kreatif meliputi pengkajian dan penelitian untuk menghasilkan inovasi produk baru, metode baru, baik berupa teknologi tepat guna, prototype atau produk yang sudah bisa diakui oleh dunia industri.

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Boyolali yang versi BPS mencapai 9,81%. Angka ini berbeda dengan yang dirilis oleh Centre For Development yaitu 6,68%. Pemerintah kabupaten

Boyolali selalu mengupayakan penurunan kemiskinan dan mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Boyolali.

Boyolali merupakan daerah penghasil susu dan ini merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif yang perlu dikembangkan. Ekonomi kreatif akan menjadi pendorong bagi perekonomian, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan. Angka kemiskinan dapat ditekan sehingga kesejahteraan semakin tinggi.

Pemerintah Kabupaten Boyolali berharap ada penyediaan dana KUR. Saran yang disampaikan: penyediaan dana KUR dari pemerintah tidak hanya ke Bank Umum namun juga kepada Bank Perkreditan Rakyat. Adanya desain pengembangan ekonomi kreatif yang menyesuaikan dengan klasifikasi pelaku-pelaku usaha di subsektor tersebut.

Untuk memajukan industri kreatif yang ada dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi sebagai mediator dan fasilitator untuk memudahkan dan menjembatani antara produsen, pelaku usaha dan konsumen. Saran lain adalah peningkatan inovasi teknologi tepat guna melalui program pemerintah yang berbasis pemberdayaan masyarakat khusus dan fasilitas pembiayaan dalam bentuk Kurda (kredit usaha rakyat daerah) untuk pelaku UMKM.







RESENSI BUKU

Judul Buku	: Sofyan Tan: Dokter Penakluk Badai
Penulis	: J. Anto
Ukuran	: 15 cm x 23 cm
Tebal	: 300 halaman
Terbit	: September 2022
Penerbit	: Penerbit Buku Kompas

Sofyan Tan: Dokter, Pendidik, sekaligus Politisi

Buku "Dokter Penakluk Badai" yang ditulis oleh J. Anto menceritakan perjuangan hidup hidup Sofyan Tan sebagai dokter spesialis bedah saraf. Buku ini juga membahas tantangan yang dihadapinya dalam menjalankan profesinya, seperti kesulitan finansial dan tekanan psikologis. Perjuangan melawan perilaku diskriminatif dihadapinya sebagai keturunan etnis minoritas. Perjalanan hidupnya penuh liku dan tantangan. Secara keseluruhan, buku ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi para pembacanya untuk terus berjuang dan berusaha mengatasi setiap rintangan yang dihadapi dalam hidup, serta memperjuangkan kebahagiaan dan kesuksesan.



Bagi siapapun, sungguh tidak mudah hidup di era revolusi tahun 1960-an. Bagi etnis Tionghoa yang tertuduh sebagai "bagian yang terlibat dalam peristiwa kelam 1965", Sofyan Tan kecil merasakan betapa sulitnya menghadapi tantangan di era itu. Namun, diskriminasi dan berbagai kesusahan yang dialaminya bersama keluarganya, terbukti mampu dilewatinya. Meski tidak dengan mudah. Saat bersekolah di SD Jaya Lama Medan, dari rumahnya di Sunggal, dia kerap mencegat truk pengangkut pasir untuk membawanya ke Medan. Jika sopir truk baik hati, dia disuruh duduk di depan. Namun, tak jarang dia harus melompat dan bergelantungan di bak truk. Ketika negara menutup beberapa sekolah "berbau Tionghoa", ia harus berpindah-pindah sekolah. Tak jarang ia tidak, perlakuan diskriminatif, dan tidak mendapatkan bangku sekolah sehingga harus "nguping" diluar kelas

untuk sekedar mendapatkan pelajaran dari guru di dalam kelas.

Seiring dengan kondisi negara yang makin stabil, masa SMP dan SMA Sofyan Tan, dilaluinya dengan penuh romantika: mencari belut dan musang, membentuk "geng liliput" sampai "pedekate" mengendarai motor.

Meski penuh keterbatasan, impiannya untuk "membahagiakan diri sendiri melalui membahagiakan orang lain" tak pernah surut. Sofyan Tan berusaha keras mewujudkan impiannya itu melalui berbagai upaya agar dapat kuliah di Fakultas Kedokteran. Akhirnya ia lolos kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Methodist Indonesia (UMI) Medan. Dan ketika kuliah inilah, ayahnya meninggal, usaha kilang padi sang ayah terlilit utang, sehingga memaksanya untuk bekerja sambil kuliah. Saat ujian nasional sarjana kedokterannya, dia harus empat kali mengulang satu mata kuliah yang sama gegara dosen penguji bersikap rasis terhadap orang Tionghoa.

Ayah Sofyan Tan, Hisar atau Tan A Guan, tidak pernah bersekolah namun memiliki visi pendidikan yang sangat kuat. Ia bersama teman-temannya, merintis sekolah sejak tahun 1950-an bernama Chung Hwa Siek Sian. Ia memiliki perhatian terhadap warga Sunggal miskin yang tak dapat menikmati pendidikan seperti anak-anak di kota. Respons warga Sunggal menggembirakan. Bantuan pun berdatangan untuk mendirikan sekolah tersebut. Lalu, datanglah peristiwa

politik 1965. Pascaperistiwa G30S 1965, sekolah tersebut kemudian diambil alih pemerintah Indonesia yang baru. Pemerintah pada waktu itu membuat kebijakan membubarkan seluruh sekolah yang dianggap berafiliasi atau dianggap di bawah pengaruh RRC. Tahun 1971, sekolah tersebut dikembalikan kepada ayah Sofyan Tan.

Ketika sekolah yang ditinggalkan mendiang ayahnya tersebut berhasil dikelola dengan baik sejak bergabung pada 1984, Sofyan Tan justru dituduh korupsi oleh Pengurus Yayasan pada 1988. Akibatnya, dia dipenjarakan selama 3 hari. Tahun 1988, juga menjadi tahun yang istimewa buat Sofyan Tan. Ia berhasil mendirikan sekolah pembauran dibawah Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda (YPSIM). Yaitu sebuah konsep pendidikan yang bertujuan untuk mempromosikan integrasi dan kerukunan antara siswa dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan budaya. Konsep ini mendorong para siswa untuk saling menghormati dan memahami perbedaan satu sama lain, serta memperkuat kesadaran akan persamaan hak dan kesempatan bagi semua orang.

Sekolah pembauran menggunakan program pendidikan yang berfokus pada pengajaran multibudaya, sejarah dan budaya yang beragam, serta peluang partisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan



keragaman dan kesetaraan. Melalui konsep ini, diharapkan siswa dapat belajar dan tumbuh bersama-sama dalam lingkungan yang inklusif dan saling mendukung, tanpa terbatas oleh perbedaan etnis, agama, atau latar belakang budaya mereka. Berkat kepeloporannya dalam membangun sekolah pembauran, Sofyan Tan diundang ke beberapa negara untuk mempresentasikan keberhasilannya.

Di bidang kedokteran, Sofyan Tan memulai aktifitasnya sebagai co-as di RSUD Pematangsiantar pada 1983. Pada 1986 ia berhasil menyelesaikan gelar doktor lokalnya dengan penuh tantangan diskriminasi. Buku ini memaparkan kisah-kisah pasien-pasiennya yang menderita berbagai penyakit saraf, termasuk penderita stroke, tumor otak, dan cedera tulang belakang. Sofyan Tan juga membahas tantangan yang dihadapinya dalam menjalankan profesinya, seperti kesulitan finansial dan tekanan psikologis. Selain itu, ia juga membagikan berbagai tips dan saran bagi para dokter dan tenaga medis dalam menjalankan profesi mereka dengan baik dan bertanggung jawab.

Pada tahun 1991, Sofyan Tan termasuk orang yang “dicari” oleh Menteri Sarwono Kusumaatmaja. Sofyan Tan termasuk pemuda yang dianggap berani “melawan arus”. Dari sinilah Sofyan Tan terus berkenalan dengan dunia politik yang saat itu, era Orde Baru, dikuasai oleh Golkar dan organisasi pendukungnya. Aktifitasnya kini bukan lagi di bidang kedokteran dan pendidikan semata, namun aktifitas

bidang sosial lainnya juga makin menojol.

Tahun 1994, saat terjadi demonstrasi buruh, Sofyan Tan mengusulkan agar upah buruh dinaikkan. Alhasil, dia dituduh memusuhi pengusaha Tionghoa. Padahal, dia justru hendak menyelamatkan warga Tionghoa dari potensi amuk massa. Kala di sekolahnya didirikan masjid, dia diisukan telah pindah agama. Pun demikian saat dibangun gereja dan vihara.

Selepas Orde Baru dan memasuki Era Reformasi, kesempatan etnis Tionghoa untuk mengabdikan di dunia politik makin terbuka. Tahun 2008, Sofyan Tan sempat masuk bursa calon kepala daerah Sumatera Utara. Tapi tantangan politik iklim politik tetap tidak pernah mudah dihadapi. Tahun 2010, saat Sofyan Tan maju dalam Pilkada Kota Medan, ia mendapat serangan kampanye hitam. Surat kabar, majalah, dan brosur membuat seruan sekaligus ajakan agar tak memilihnya. Alasannya, karena Sofyan “kafir”, “tidak satu iman” “hendak menjual Medan ke China”, “bukan orang asli”, “warga turunan yang indekos di Medan”, dan sebagainya. Dalam Pemilu legislatif 2014 dan 2019, Sofyan Tan sebagai Caleg PDIP lolos ke Senayan dari Dapil Sumatra Utara. Pelbagai badai kehidupan sosial dan politik berhasil dilewati oleh Sofyan Tan. Masyarakat mengakui kiprahnya. Pemerintah mengganjar dengan sejumlah penghargaan. Surat kabar menyebutnya sebagai sosok paling asli

“

SOFYAN TAN TERMASUK ORANG YANG “DICARI” OLEH MENTERI SARWONO KUSUMAATMAJA. SOFYAN TAN TERMASUK PEMUDA YANG DIANGAP BERANI “MELAWAN ARUS”.



dibanding orang Indonesia “asli” dan salah satu dari “Lima Tokoh Perikat Republik”. Tidak sedikit masyarakat yang menilainya sebagai politisi yang berkarakter dan menginspirasi lewat dunia pendidikan. Sofyan Tan dianggap merepresentasikan apa yang disebut oleh Bung Karno penting dalam pembangunan yakni Nation and Character Building.

Satu hal yang dapat ditarik dari perjalanan hidup Sofyan Tan adalah perenungan bagi Indonesia bahwa diskriminasi yang didasarkan pada isu SARA merupakan hal yang harus dihapuskan. Sofyan Tan telah menunjukkan betapa susahnyanya hidup dalam berbagai perlakuan yang diskriminatif seperti saat masih menjalani kuliah kedokteran, membangun pendidikan hingga terjun ke dunia politik. Sofyan Tan tidak pernah menyerah.

Dukung Prioritas Nasional, Kemendikbudristek Berhasil Tingkatkan Capaian Akses Layanan Pendidikan

Jakarta, 7 Maret 2024 – Dalam Sidang Komisi X DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta pada Rabu (6/3), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim menyampaikan capaian kinerja yang mendukung optimalisasi program Prioritas Nasional. Ia menjabarkan bahwa akses layanan pendidikan berhasil ditingkatkan cakupannya adalah Angka Kesiapan Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun dan 13-15 tahun, dan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/SMLB/ Sederajat dan Perguruan Tinggi. Lalu, proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi juga mengalami peningkatan. Seiring dengan peningkatan indeks kemahiran berbahasa Indonesia.

“Dalam mendukung tercapainya Prioritas Nasional, Kemendikbudristek menjaga komitmen untuk pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan berkualitas. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 pada kategori sangat baik (nilai sementara = 95,59%),” ujar Nadiem.

Selain itu, aspek kebermanfaatan dari kinerja Kemendikbudristek ditunjukkan juga dari Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan yang meningkat setiap tahunnya. “Kemendikbudristek tetap berkomitmen dalam meningkatkan kinerja dan dukungan terhadap Prioritas Nasional, yang ditunjukkan dengan capaian pada berbagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Capaian prioritas dimaksud,



“
**KEMENDIKBUD-
RISTEK TETAP
BERKOMITMEN
DALAM
MENINGKATKAN
KINERJA DAN
DUKUNGAN
TERHADAP
PRIORITAS
NASIONAL**

yaitu digitalisasi pendidikan, sekolah dan guru penggerak, penerapan Kurikulum Merdeka, program literasi, akreditasi dan asesmen, kebahasaan, dan pemajuan kebudayaan,” jelas Mendikbudristek.

Dalam hal digitalisasi pendidikan, terdapat 79.259 sekolah formal telah menerima bantuan TIK tahun 2020-2023 (Belanja Kemendikbudristek dan DAK Fisik), 1.382.512 perangkat TIK telah diberikan untuk mendukung program digitalisasi sekolah (dikdasmen), serta ada empat Platform Digital: Platform Merdeka Mengajar, Platform Kampus Merdeka, Platform Sumber Daya Sekolah, Platform Profil Rapor Pendidikan dan Manajemen Data serta Infrastruktur.

Untuk Platform Merdeka Mengajar (PMM), sejumlah 3.540.856 log in pada Platform Merdeka Mengajar selama tahun 2023,



225.400 sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka telah menggunakan PMM dengan cukup baik, 2.219.099 PTK yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka telah mengakses PMM, serta 267.024 PTK telah mengunggah 774 ribu lebih Bukti Karya pada PMM.

Sementara itu, dalam pemanfaatan Aplikasi ARKAS (ARKAS), 392.709 atau 91,28% satuan pendidikan aktif menggunakan ARKAS (Satuan Pendidikan), 100% dinas aktif menggunakan MARKAS (Dinas Pendidikan), serta 53,63 triliun potensi anggaran BOS TA 2023 tercatat pada ARKAS secara transparan.

Terkait dengan Ekosistem Aplikasi SIPLah, terdapat 18 mitra pasar daring pada ekosistem SIPLah, 273.647 Satuan Pendidikan telah menggunakan ekosistem SIPLah, 13,8 triliun telah dibelanjakan melalui ekosistem SIPLah, 52 ribu penyedia barang/jasa telah terhubung dengan 18 mitra e-commerce SIPLah, serta 5,7jt Produk tersedia pada SIPLah, baik produk umum maupun UMKM. Untuk Aplikasi TanyaBOS, tercatat 17.494 pengunjung aktif dan berpartisipasi di forum TanyaBOS, 3.600 pertanyaan dilayangkan di dalam platform TanyaBOS.

Mengenai pembiayaan pendidikan, terdapat 14.891 siswa menerima bantuan ADEM dari tahun 2020 hingga 2023, 18.109.119 siswa

mendapat bantuan PIP pada tahun 2023, 916.827 mahasiswa mendapat bantuan KIP Kuliah pada tahun 2023, serta 7.614 mahasiswa mendapat bantuan ADIK pada tahun 2023.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Suharti mengatakan bahwa Kemendikbudristek terus berupaya untuk memastikan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran baik secara jumlah maupun kebermanfaatannya.

Sementara untuk capaian terkait Guru dan Tenaga Kependidikan, 94.685 calon guru penggerak mengikuti pendidikan Guru Penggerak dari tahun 2020 hingga 2023, jumlah kelulusan 61.256 guru, 2.730.767 jumlah Guru Pelatihan Mandiri dari tahun 2020 hingga 2023, 422.679 guru mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari tahun 2020 hingga 2023, serta 774.999 guru honorer lulus seleksi guru ASN PPPK dari tahun 2021 hingga 2023.

Mengenai Akreditasi dan Asesmen Nasional (AN), terdapat 238.471 satuan pendidikan formal diakreditasi dari tahun 2020 hingga 2023, 106.052 program/satuan PAUD dan PNF diakreditasi dari tahun 2020 hingga 2023, dan 283.609 satuan pendidikan yang melaksanakan AN pada tahun 2021, 282.962 satuan pendidikan yang melaksanakan AN pada tahun 2022, dan 492.204 satuan pendidikan yang melaksanakan AN pada tahun 2023 (termasuk Uji Kesetaraan dan Sulingjar PAUD).

“

**KEMENDIKBUD-
RISTEK TERUS
BERUPAYA UNTUK
MEMASTIKAN
AGAR BANTUAN
YANG DIBERIKAN
TEPAT SASARAN
BAIK SECARA
JUMLAH MAUPUN
KEBER-
MANFATAANNYA.**

Capaian pada Pendidikan Tinggi yaitu 937.339 mahasiswa mengikuti program studi di luar kampus dari tahun 2020 hingga 2023; Rp 1,61 triliun dana padanan dari pihak industri dalam proyek kerjasama Kedaireka (2021-2023); 10 PTN-BH baru dari tahun 2020 hingga 2023; 8.452 program studi di Perguruan Tinggi yang diakreditasi BAN-PT dari tahun 2020 hingga 2023; 2.254 program studi dengan inovasi pembelajaran digital dari tahun 2020 hingga 2023; 1.635 mahasiswa penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) dari tahun 2020 hingga 2023

Berikutnya, untuk capaian pendidikan dan pelatihan vokasi, yaitu

1.851 SMK pelaksana program SMK Pusat Keunggulan dari tahun 2021 hingga 2023; 1.785.872 siswa menerima manfaat dalam program SMK Pusat Keunggulan dari tahun 2021 hingga 2023; Rp 643,17 miliar investasi industri yang dihasilkan dari program SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan (Matching Fund) dengan melibatkan 720 industri dan 769 SMK pada tahun 2022 dan 2023; Rp 203 miliar investasi yang dihasilkan dari program Matching Fund Pendidikan Tinggi Vokasi dengan melibatkan 504 mitra industri dari tahun 2021 hingga 2023; 202.457 orang peserta program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dari tahun 2020 hingga 2023; 87.311 orang peserta program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dari tahun 2020 hingga 2023; serta 37.492 orang guru kejuruan, kepala sekolah, dosen yang mengikuti upskilling dan reskilling



“
**KITA PASTIKAN
 SELURUH
 PEMBELAJARAN
 DI VOKASI DAPAT
 DILAKSANAKAN
 DENGAN BAIK.
 KERJA SAMA
 INDUSTRI TERUS
 DIPERKUAT
 DALAM
 MENINGKATKAN
 KECAKAPAN
 KERJA DAN
 KEWIRASUAHAAN
 DALAM
 MENCIPTAKAN
 PRODUK BARU
 DALAM NEGERI**”

berstandar industri dari tahun 2020 hingga 2023

“Kita pastikan seluruh pembelajaran di vokasi dapat dilaksanakan dengan baik. Kerja sama industri terus diperkuat dalam meningkatkan kecakapan kerja dan kewirasusahaan dalam menciptakan produk baru dalam negeri. Kita terus tingkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam menyediakan layanan Diksi yang selaras dengan kebutuhan nasional,” ujar Sesjen Suharti.

Untuk kemajuan perkembangan Sekolah Penggerak, hingga saat ini ada 506 dari 514 Kab/Kota telah berpartisipasi pada program “Sekolah Penggerak” hingga tahun 2023, 14.239 satuan pendidikan telah berpartisipasi pada program “Sekolah Penggerak” hingga tahun 2023, serta 5.676 Sekolah Penggerak telah melakukan pengimbasan kepada sekolah sekitar hingga tahun 2023

Untuk Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), sebanyak 309.149 sekolah terdaftar telah mengimplementasikan kurikulum merdeka hingga tahun 2023, dengan 6.200 sekolah dari daerah Tertinggal serta 2.140.569 PTK terdaftar telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dari tahun 2020 hingga 2023.

Sementara itu, terkait capaian BOSP (BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan), untuk penyaluran Dana BOS telah dilakukan kepada 217.752 satuan pendidikan (99,87%) pada tahun 2023. Penyaluran BOP PAUD dan Kesetaraan telah dilakukan kepada 192.714 Satuan Pendidikan (99,65%) pada tahun 2023. Peningkatan satuan biaya BOS dan BOP yang disesuaikan dengan karakteristik daerah berdasarkan indeks kemahalan konstruksi tiap wilayah kabupaten/kota, dan peserta didik. Khusus wilayah 3T, rata-rata peningkatan satuan biaya BOS sebesar 49,63% dan BOP sebesar 50,89%

Berikutnya untuk Perencanaan Berbasis Data (PBD), sudah 100% atau 548 pemda yang telah mengikuti Bimtek PBD (Kadis Pendidikan, Kabid PAUD-SD-SMP-SMA-SMK, perwakilan pengawas/penilik, MKKS, MKPS, perwakilan kepala sekolah); 363.041

atau 89,74% satuan pendidikan dan 548 atau 100% pemda telah menggunakan Rapor Pendidikan; serta 360.247 atau 89,05% satuan pendidikan telah mengunduh Rapor Pendidikan.

Catatan capaian literasi yaitu 16.868.247 eksemplar buku telah terdistribusi ke satuan Pendidikan tahun 2021 hingga 2022, 57.087 satuan pendidikan di 3T dan Non 3T tahun 2021 hingga 2022, 319 taman bacaan masyarakat penerima buku bacaan literasi sampai dengan tahun 2023, 40 perpustakaan daerah penerima buku bacaan literasi tahun 2021, 442 kabupaten/kota di seluruh Indonesia penerima buku bacaan literasi tahun 2021 hingga 2023, serta 1.998 orang telah mengikuti pelatihan pemanfaatan buku bacaan tahun 2022 dan 15.237 orang di tahun 2023.

Mengenai Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD), terdapat 217 kab/9 kota

di 26 provinsi melaksanakan revitalisasi bahasa daerah selama tahun 2023, 72 bahasa daerah/dialek yang sudah direvitalisasi selama tahun 2023, 22.934 sekolah SD/SMP dan 511 komunitas terlibat dalam RBD 2023, 4.158.656 siswa SD dan SMP terlibat dalam pembelajaran bahasa daerah selama tahun 2023, 96.388 pengawas, kepala sekolah, dan guru aktif terlibat RBD selama tahun 2023, 14.317 pegiat Bahasa/sastra daerah berpartisipasi dalam RBD selama tahun 2023, 1.696 Perwakilan pemerintah daerah dan Lembaga yang terlibat dalam RBD selama tahun 2023, serta 751.429 partisipan FTBI selama tahun 2023.

Untuk Internasionalisasi Bahasa Indonesia, hingga sekarang capaiannya adalah sebanyak 54 negara terfasilitasi program BIPA tahun 2021 hingga 2023, 470 lembaga penyelenggara program BIPA tahun 2021 hingga 2023, 173.864 orang pemelajar BIPA tahun 2021

hingga 2023, 1.868 penugasan pengajar BIPA tahun 2021 hingga 2023, dan 5.786 produk penerjemahan tahun 2021 hingga 2023.

Sementara untuk pemajuan kebudayaan, sebanyak 575 Cagar Budaya yang ditetapkan (tahun 2020 sebanyak 175, tahun 2021 sebanyak 200, tahun 2022 sebanyak 110, tahun 2023 sebanyak 90), 857 Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (tahun 2020 sebanyak 153, tahun 2021 sebanyak 289, tahun 2022 sebanyak 200, tahun 2023 sebanyak 215), 26.072 Cagar Budaya dan OPK yang dilestarikan (tahun 2020 sebanyak 6.922, tahun 2021 sebanyak 7.708, tahun 2022 sebanyak 10.363, tahun 2023 sebanyak 1.079), serta 777 Giat Warisan Budaya (tahun 2020 sebanyak 147, tahun 2021 sebanyak 187,2022 sebanyak 143, tahun 2023 sebanyak 300).
(ADV)



SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Laman:

kemdikbud.go.id

Twitter:

twitter.com/Kemdikbud_RI

Instagram:

[instagram.com/kemdikbud.ri](https://www.instagram.com/kemdikbud.ri)

Facebook:

[facebook.com/kemdikbud.ri](https://www.facebook.com/kemdikbud.ri)

Youtube:

KEMENDIKBUD RI

Pertanyaan dan Pengaduan:

ult.kemdikbud.go.id

#MerdekaBelajar



KUATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL BERKAT PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jakarta, 26 Maret 2024 - Pariwisata dan ekonomi kreatif tak diragukan lagi merupakan salah satu sektor penopang ekonomi nasional yang paling bisa diandalkan. Dari tahun ke tahun, pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan kontribusi efektif yang langsung dirasakan masyarakat. Khususnya dalam mendorong kebangkitan ekonomi dan terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja.

Meski sempat terdampak pandemi COVID-19, pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi sektor yang paling cepat pulih.

Sejarah telah mencatat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia sangat terpukul akibat pandemi COVID-19. Namun sejarah juga mencatat Indonesia mampu bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat, berkat sinergi bersama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang bahu-membahu untuk keluar dari masa sulit akibat pandemi.

"Maka momentum kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif ini harus terus dijaga sejalan dengan upaya menyongsong cita-cita pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno.

Kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional dapat dilihat pada capaian kinerja sektor parekraf sepanjang 2023. Target-target yang telah ditetapkan tidak hanya tercapai tapi terlampaui dengan semangat 3G yakni gercep, geber, dan gaspol.

Adapun capaian sektor parekraf di tahun 2023 semakin tampak mulai dari kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang selama tahun 2023 mencapai 11,68 juta kunjungan. Angka ini meningkat 98,3 persen dibandingkan pada 2022.

"Target berhasil terlampaui. Pencapaian ini melebihi target batas atas kunjungan wisman di 2023 sebesar 8,5 juta," ujar Sandiaga.

Malaysia menjadi negara yang



“ MOMENTUM KEBANGKITAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INI HARUS TERUS DIJAGA SEJALAN DENGAN UPAYA MENYONGSONG CITA-CITA PARIWISATA INDONESIA YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN, ”

menyumbang jumlah wisman terbesar ke Indonesia di tahun 2023 dengan persentase sebesar 16,28 persen, disusul Australia sebesar 12,26 persen, kemudian Singapura 12,11 persen, Tiongkok 6,75 persen, dan Timor Leste sebesar 6,24 persen.

Rata-rata lama tinggal wisman berkisar antara 7–12 malam dengan rata-rata lama tinggal tertinggi pada April 2023 mencapai 12,4 malam. Dimana pada bulan tersebut wisman asal Rusia dan Tiongkok mengalami

peningkatan lama tinggal yakni 52,14 malam dan 43,88 malam.

Sementara untuk nilai devisa pariwisata hingga September 2023 tercatat 10,46 miliar dolar AS. Kontribusi PDB pariwisata diperkirakan mencapai angka 4 persen, nilai tambah ekraf sebesar Rp1.050 triliun, nilai ekspor ekraf sebesar 17,38 miliar dolar AS, dan jumlah pergerakan wisatawan nusantara sebesar 688,78 juta perjalanan hingga Oktober 2023.

Capaian-capaian tersebut berdampak pada masyarakat yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendapatkan lapangan kerja kembali. Tercatat jumlah tenaga kerja pariwisata hampir 22 juta dan jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif sebesar 24,3 juta.

"Berarti total kalau dijumlah sebanyak 45 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," ujar Menparekraf Sandiaga.

Lalu terkait dengan posisi pariwisata Indonesia di dunia internasional, Menparekraf Sandiaga menjelaskan, dalam laporan TTDI terbaru dari World Economic Forum, Indonesia naik 12 peringkat menjadi posisi 32 di atas Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Indonesia juga berhasil berada di urutan pertama dalam Global Muslim Travel Index.

Realisasi investasi di sektor



parekraf pada tahun 2023 juga tumbuh positif. Tercatat penanaman modal asing telah mencapai Rp8,70 triliun dan untuk penanaman modal dalam negeri sebesar Rp14,99 triliun.

"Sehingga total investasi di semester pertama tahun 2023 sebesar Rp23,70 triliun," ujar Menparekraf Sandiaga.

Capaian-capaian tersebut tentu tidak lepas dari berbagai program Kemenparekraf yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu (3T) di sepanjang 2023.

Sesuai RPJMN, program strategis Kemenparekraf dibagi menjadi lima fokus indikator yakni pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan; peningkatan daya saing; penciptaan nilai tambah; transformasi digital, dan peningkatan produktivitas. Masing-masing fokus indikator tersebut dijalankan dengan berbagai turunan program.

Untuk pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan, program yang dijalankan dimulai dari penyusunan naskah awal RIPPARNAS 2026-2040, standardisasi dan sertifikasi usaha, memaksimalkan publikasi kampanye #DiIndonesiaAja, serta penyiapan desa wisata berkelanjutan.

Sementara untuk indikator

pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan, Kemenparekraf menjalankan program Karisma Event Nusantara (KEN). Sepanjang 2023, dari seluruh event KEN yang berlangsung mampu memberikan dampak pergerakan 7,4 juta wisatawan dengan perputaran uang mencapai Rp12,4 triliun. Selain itu lebih dari 11.400 UMKM yang tersentuh serta kurang lebih 143.200 pelaku seni/event terlibat.

"Peningkatan produksi barang dan jasa di Indonesia mencapai Rp212,9 miliar dan harapannya ini akan semakin kita perluas di tahun 2024," ujar Sandiaga.

Kemenparekraf juga menggulirkan program Aksi Selaras Sinergi (Aksilarasi) yakni program pendampingan dan peningkatan kebermanfaatannya di 12 produk unggulan di 5 destinasi pariwisata super prioritas.

Selanjutnya, untuk indikator peningkatan daya saing, Kemenparekraf menjalankan program dengan konsep-konsep yang langsung menyentuh pilar-pilar penguatan. Salah satunya adalah melalui penerbitan Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN), peningkatan SDM

“

**TARGET
BERHASIL
TERLAMPAUI.
PENCAPAIAN INI
MELEBIHI
TARGET BATAS
ATAS
KUNJUNGAN
WISMAN DI
2023 SEBESAR
8,5 JUTA**

pariwisata melalui upskilling, reskilling, dan new skilling yang telah diikuti lebih dari 13 ribu untuk pelaku pariwisata dan lebih dari 13 ribu pelaku ekonomi kreatif.

"Selain itu juga penguatan rantai pasok industri yang juga kita sebut sebagai hilirisasi dimana terdapat komitmen antara industri parekraf dan UMKM. UMKM tersebut yakni 29 UMKM di Bandung, 34 UMKM di Bali, dan 39 UMKM di Balikpapan," kata Menparekraf

“ TOTAL KALAU DIJUMLAH SEBANYAK 45 JUTA MASYARAKAT INDONESIA YANG MENGANTUNG KAN HIDUPNYA PADA SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

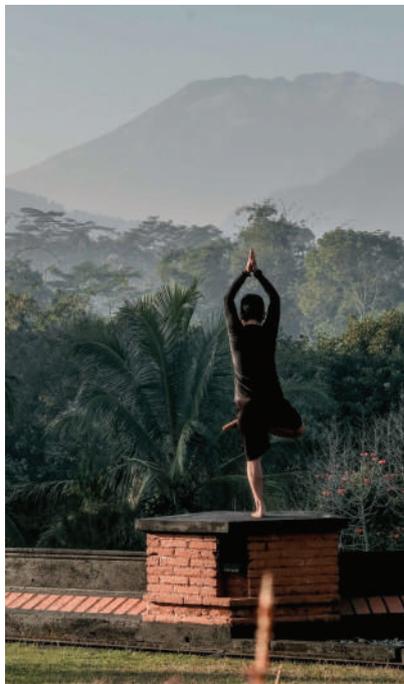
Sandiaga.

Kemenparekraf berkomitmen untuk melanjutkan program-program tersebut untuk mendukung capaian yang lebih tinggi di tahun 2024.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf) Angela Tanoesoedibjo mengungkapkan sejumlah faktor yang dianggap mampu menjadi pendorong pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia di 2024. Di antaranya pengembangan destinasi pariwisata yang berkualitas dan inovatif, pemanfaatan teknologi yang mendukung kemudahan berwisata juga peningkatan pendapatan di antara wisatawan domestik.

Sementara tantangan yang mempengaruhi pertumbuhan pariwisata diantaranya kondisi ekonomi global yang tidak menentu, perubahan perilaku wisatawan, ketidakstabilan geopolitik global serta penurunan daya beli masyarakat.

Sedangkan di sektor ekonomi kreatif, sejumlah faktor yang dianggap mampu menjadi pendorong pertumbuhan di antaranya inovasi dan kreativitas dari pelaku usaha/industri, dukungan infrastruktur dan teknologi serta kolaborasi dan sinergi antar pelaku usaha/industri.



Sementara tantangan yang mempengaruhi pertumbuhan ekraf yakni akses pendanaan untuk pengembangan dan ekspansi usaha ekraf, rendahnya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, perubahan teknologi yang sangat cepat serta akses ke pasar internasional maupun domestik.

Lebih lanjut Angela menjelaskan, ada empat tren pariwisata di tahun 2024. Yakni Bleisure, Wellness Experience, Deep and Meaningful, dan Set-Jetting.

Angela mengungkapkan, kembali pulihnya perjalanan bisnis secara global dan tumbuhnya kebebasan untuk bekerja jarak jauh meningkatkan fleksibilitas untuk berwisata di sela rutinitas pekerjaan. Sehingga menjadikan bleisure (business and leisure) sebagai tren yang akan terus tumbuh pascapandemi.

“Tren ini akan semakin meningkat, bagaimana orang akan menggabungkan bisnis dan leisure menjadi satu,” kata Wamenparekraf Angela.

Peluang pun dapat diambil dengan menggabungkan paket-paket gabungan antara bisnis dengan wisata.

“Jadi bagaimana kita membuat paket-paket gabungan antara bisnis dan leisure, apalagi semakin banyaknya MICE, ini mendorong pertumbuhan bisnis, ini bisa kita gandengkan dengan paket wisata,” kata Wamenparekraf.

Selanjutnya, tren pengalaman wisata kebugaran



PENGUATAN RANTAI PASOK INDUSTRI YANG JUGA KITA SEBUT SEBAGAI HILIRISASI DIMANA TERDAPAT KOMITMEN ANTARA INDUSTRI PAREKRAF DAN UMKM. UMKM TERSEBUT YAKNI 29 UMKM DI BANDUNG, 34 UMKM DI BALI, DAN 39 UMKM DI BALIKPAPAN

(wellness experience) yang diproyeksikan akan semakin diminati. Hal ini berkaitan dengan pergeseran perilaku wisatawan usai pandemi COVID-19 yang semakin menyadari pentingnya kesehatan jiwa dan pengalaman spiritual.

“Wellness experience ini menjadi penting maka kami mengembangkan wisata kesehatan, ini sedang kami garap, di Bali ada KEK Sanur kesehatan yang sedang dibangun, kami harapkan ini menjadi salah satu yang menjadi point of interest dari wisata kesehatan kita,” kata Wamenparekraf Angela.

Ada juga tren pariwisata deep and meaningful. Ketidakpastian selama pandemi membuat lebih dari tiga per empat wisatawan dalam survei Booking.com menginginkan pengalaman wisata yang lebih berkualitas dan bermakna.

Indonesia memiliki potensi nature dan culture tinggi yang dapat





“

PERGERAKAN MASYARAKAT SECARA NASIONAL ATAU WISATAWAN NUSANTARA SELAMA LIBUR LEBARAN TAHUN INI BERPOTENSI MENCAPAI 71,7 PERSEN DARI JUMLAH PENDUDUK INDONESIA

dikemas dengan story telling menarik. Sehingga wisatawan dapat menikmati pengalaman wisata yang berkualitas dan bermakna. Tren lainnya yakni wisata set jetting (tempat-tempat syuting film) yang bakal digandrungi dan dikunjungi untuk berwisata.

Sedangkan di sektor ekonomi kreatif, juga ada empat tren pada tahun 2024 mencakup Audio Visual, Mobile Game, Musik, dan Kolaborasi.

Libur Lebaran

Selain program yang akan dijalankan sepanjang 2024, Kemenparekraf/Baparekraf juga mengantisipasi berbagai momentum dalam upaya mendorong pergerakan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Salah satunya adalah saat momen libur lebaran.

Menparekraf Sandiaga

mengungkapkan pergerakan masyarakat secara nasional atau wisatawan nusantara selama libur lebaran tahun ini berpotensi mencapai 71,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebesar 193,6 juta orang.

"Angka ini meningkat dibandingkan pada masa lebaran tahun 2023 yakni 123,8 juta orang," kata Menparekraf Sandiaga.

Dari jumlah tersebut, daerah asal perjalanan terbesar masyarakat diperkirakan dari Jawa Tengah dengan jumlah 31,3 juta orang atau sebesar 16,2 persen. Kemudian disusul Jabodetabek sebesar 28,43 juta orang dan Jawa Tengah sebesar 26,11 juta orang.

Sementara untuk daerah tujuan Jawa Tengah diperkirakan menjadi tujuan terbesar dengan 61,6 juta orang, disusul Jabodetabek sebesar 37,6 juta orang, dan Jawa Barat sebesar 32,1 juta orang.

"Jadi yang punya destinasi di Jawa Tengah harus bersiap-siap termasuk destinasi super prioritas Borobudur untuk menyiapkan destinasinya sesuai dengan CHSE kita," ujar Sandiaga.

Puncak pergerakan masyarakat untuk arus mudik diperkirakan terjadi pada H-2 lebaran sebesar 13,7 persen atau sebanyak 26,6 juta orang. Sementara untuk arus balik diperkirakan akan terjadi pada H+3 lebaran yang diperkirakan mencapai 21,2 persen atau sebanyak 41 juta orang.

Terkait moda transportasi, berdasarkan data yang diolah Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik

diketahui bahwa kereta api masih menjadi yang terfavorit pilihan masyarakat.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, stakeholder, dan pengelola daya tarik wisata termasuk desa wisata untuk memastikan kesiapannya agar momen liburan 2024 ini bisa berlangsung dengan aman dan lancar," kata Menparekraf Sandiaga.

Ia meminta pengelola destinasi wisata juga sentra ekonomi kreatif di seluruh daerah tanah air untuk mempersiapkan diri menghadapi musim libur lebaran 2024 yang diprediksi akan dipadati wisatawan khususnya wisatawan nusantara. Ini menjadi salah satu momentum yang baik bagi sektor parekraf untuk mencapai angka pertumbuhan yang

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Website :

<https://kemenparekraf.go.id>

Instagram :

<https://www.instagram.com/kemenparekraf>

X :

<https://x.com/kemenparekraf>

Facebook :

<https://www.facebook.com/ParekrafRI>

Tiktok :

<https://www.tiktok.com/@kemenparekraf>

Youtube :

<https://youtube.com/@Kemenparekraf>

Pemohonan Informasi :

<https://ppid.kemenparekraf.go.id>
Contact Center : 0811 895 6767



InfoKOM.X

Gedung Nusantara I Komisi X. Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270

EMAIL: komisi10@dpr.go.id /komisi10dpri@gmail.com

TELP: 021-5756035/021-5756033

MEDIA SOSIAL: Instagram: @komisix Facebook: komisix